

### **BAB 3**

## **LATAR BELAKANG SEJARAH KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**

Bab ini merupakan tinjauan historis mengenai konflik antara Israel dan Palestina yang diberikan secara singkat dan jelas, berisikan penjelasan tentang Palestina kuno, pendirian negara Israel, penyerangan negara-negara Arab, perlawanan Palestina, krisis teluk, dan transformasi hubungan kedua belah pihak menuju perdamaian. Bagian pertama akan menceritakan wilayah Palestina pada masa lalu dimana saat itu Palestina telah menjadi wilayah yang diperbutkan oleh berbagai kerajaan. Bagian kedua menjelaskan pendirian negara Israel yang menjadi pemicu terjadinya konflik berdarah diantara Israel dan Palestina. Bagian ketiga memberikan penjelasan tentang penyerangan negara-negara Arab sebagai reaksi atas ketidaksukaan mereka terhadap pembentukan negara Israel yang dikhawatirkan dapat membahayakan keberadaan bangsa Arab di Timur Tengah.

Kemudian bagian keempat memberikan penjelasan tentang perlawanan Palestina terhadap Israel termasuk diantaranya pembentukan organisasi-organisasi perlawanan dan Intifada. Bagian kelima menceritakan tentang krisis teluk sebagai akibat terjadinya Perang Teluk yang akan memberikan perubahan eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Dan terakhir, bagian keenam akan menjelaskan hubungan kedua belah pihak menuju perdamaian pasca terjadinya Intifada hingga diraihnya suatu kesepakatan untuk melakukan negosiasi damai di Oslo. Penjelasan dari masing-masing bagian dari bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang singkat namun efektif tentang perkembangan konflik dan perubahan hubungan antara Israel dan Palestina dari masa ke masa.

### **3.1 Palestina Kuno**

Konflik antara Israel dan Palestina dilatarbelakangi oleh klaim kedua bangsa tersebut atas wilayah yang sama, yakni Palestina. Seperti yang dikemukakan oleh Kriesberg (1998) bahwa suatu konflik akan muncul ketika dua atau lebih orang atau kelompok memiliki keinginan atau tujuan yang saling bertentangan, "A conflict exists when two or more persons or groups manifest they belief that they

*have incompatible goals*<sup>66</sup>, maka kedua belah pihak tersebut pun telah sejak lama berperang untuk memperebutkan wilayah ini. Sejarah membuktikan bahwa klaim kepemilikan atas wilayah Palestina memang cukup sulit untuk diputuskan. Tiga ribu tahun yang lalu penamaan "Israel" dan "Palestina" berasal dari dua bangsa yang masuk ke wilayah tersebut pada waktu yang bersamaan, yakni abad ke-12. Kata Israel berasal dari bangsa Yahudi, yang menyebut diri mereka *Bnei Israel* (*the people or tribe of Israel*), yang mana mempercayai bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan (*Eretz Israel/Land of Israel*). Sedangkan kata Palestina berasal dari bangsa Philistines, yaitu masyarakat asli Yunani, yang menetap di sekitar pantai Palestina bersamaan ketika Yahudi menguasai bukit-bukit di bagian dalam wilayah tersebut. Hampir dua ratus tahun kemudian Yahudi bersatu untuk mengalahkan Philistines dan masyarakat lain yang berada di Palestina. Tak lama setelah itu Kerajaan Israel pun kemudian berdiri disekitar tahun 1000 SM.<sup>67</sup>

Hingga tahun 800-an SM Kerajaan Israel masih berkuasa atas tanah Palestina. Namun ketika bangsa asing datang dan melakukan penjajahan terhadap Palestina, Yahudi diusir dan terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah lain seperti Eropa dan Mesopotamia (kini dikenal sebagai Irak). Pada tahun 700-an SM, kerajaan tersebut mulai ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain secara berturut-turut yakni Assyria<sup>68</sup>, Babylon<sup>69</sup>, dan Romawi sebagai bagian dari rencana perluasan pengaruh kerajaan. Setelah dikuasai oleh Romawi, penaklukan terhadap Palestina mulai dilakukan atas dasar penyebaran agama. Agama yang pertama kali menguasai Palestina adalah Agama Islam yang dibawa oleh pasukan gurun<sup>70</sup> dan kemudian Agama Kristen yang dibawa oleh Crusader<sup>71</sup>. Tak lama setelah

<sup>66</sup> Louis Kriesberg, *Mediation and the Transformation of the Israeli-Palestinian Conflict*, Journal of Peace Research, 38:3 (May, 2001), h. 374.

<sup>67</sup> Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 1-2.

<sup>68</sup> Assyria berhasil menguasai tanah Palestina pada tahun 722 SM.

<sup>69</sup> Kerajaan Babylon adalah kerajaan yang mewarisi Kerajaan Assyria, yang menguasai Palestina hingga tahun 63 SM ketika Romawi berhasil mengalahkan kerajaan ini dan akhirnya menguasai Palestina.

<sup>70</sup> Menganggap Yerussalem, yang merupakan bagian dari wilayah Palestina, adalah tanah sakral karena disanalah Nabi terakhir umat Islam berada setelah melakukan perjalanan ke surga.

<sup>71</sup> Sama seperti pasukan gurun yang menganggap tanah tersebut sakral, Crusader menganggap Yerussalem adalah rumah Tuhan yang harus dikuasai untuk melindunginya dari pihak-pihak lain yang tidak mengakui Tuhan mereka.

Crusader berkuasa, Palestina diambil alih oleh Ottoman<sup>72</sup>. Ottomanlah yang paling lama menguasai Palestina yakni selama hampir 750 tahun dari tahun 1187 hingga 1918. Dan selama dalam penguasaan Ottoman bangsa yang paling dominan saat itu adalah bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam.<sup>73</sup>

### 3.2 Negara Israel

Pada abad ke-19, Ottoman mulai melakukan kerjasama dengan bangsa Eropa untuk meningkatkan perekonomiannya. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke Palestina. Melalui suatu gerakan yang mereka sebut Gerakan Zionisme<sup>74</sup>, warga Yahudi melakukan pendudukan kembali wilayah Palestina dengan membeli tanah-tanah kosong. Yahudi menyadari bahwa tanah di Palestina sangat penting untuk mereka miliki bagi masa depan Negara Israel yang ingin mereka dirikan. Untuk itu Yahudi mendirikan *Jewish National Fund* pada tahun 1901 untuk mengkoordinasikan dan memusatkan informasi pembelian tanah bagi orang-orang Yahudi dan memastikan bahwa tanah yang telah mereka beli tidak akan pernah dijual kembali.<sup>75</sup>

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Yahudi ini berhasil terhindar dari kecurigaan pemerintah Ottoman dengan menyatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pajak pendapatan dan untuk memodernisasi populasi yang berpencar dengan mendirikan permukiman-permukiman. Diantara tahun 1895 hingga 1914, empat puluh ribu Yahudi telah berhasil memasuki Palestina dan seringkali bukan untuk alasan agama melainkan berkoloni dan mendirikan basis/pangkalan untuk menguasai kembali Palestina sebagai Israel.<sup>76</sup> Walau berhasil meyakinkan pemerintah Ottoman, Yahudi tidak berhasil dalam meyakinkan bangsa Arab Palestina. Mereka percaya bahwa kehadiran dan pemukiman Yahudi yang semakin bertambah suatu saat akan menjadi ancaman bagi bangsa Arab di Palestina.

<sup>72</sup> Kerajaan yang berasal dari Turki, penaklukan Ottoman terhadap Palestina saat itu dilakukan oleh Rajanya yang bernama Saladin.

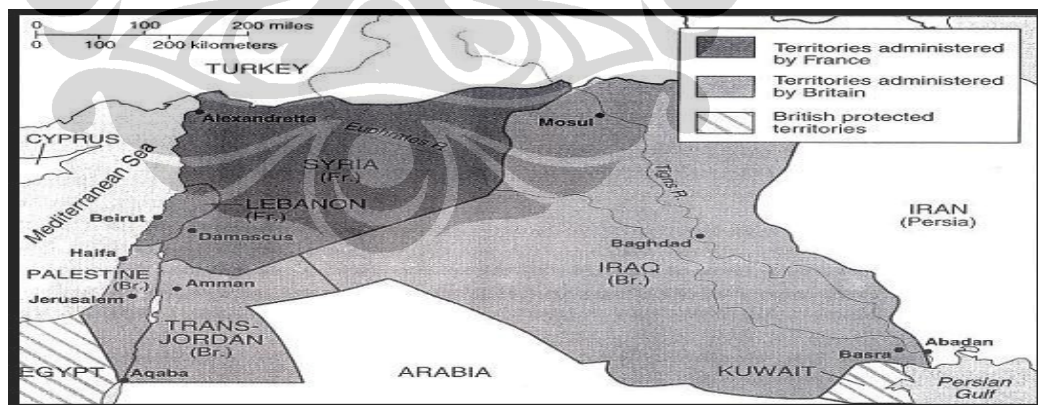
<sup>73</sup> Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 2-9.

<sup>74</sup> Suatu gerakan politik kaum Yahudi yang dicetus oleh Theodor Herzl semenjak tahun 1882, dimana bertujuan untuk mencapai kehidupan merdeka Yahudi atas tanah Palestina.

<sup>75</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 124.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 2-34.

Menjelang Perang Dunia I, Turki menyatakan diri akan beraliansi dengan Jerman. Inggris yang khawatir akan kekuatan aliansi ini memutuskan untuk meminta bantuan Yahudi. Inggris percaya bahwa dukungan yang diberikan oleh Zionis akan membawa Yahudi Amerika untuk mendorong Presiden Woodrow Wilson agar mengeluarkan keputusan beraliansi dengan Inggris. Sebagai gantinya Inggris membentuk Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 yang menjanjikan kampung halaman untuk Yahudi di Palestina, bukan kedaulatan Yahudi atas seluruh tanah Palestina maupun Negara Palestina. Tapi Zionis tetap menganggap bahwa pembentukan deklarasi ini merupakan suatu awal yang baik untuk pengakuan Negara Israel di Palestina.<sup>77</sup> Setelah kemenangan pihak Inggris pada Perang Dunia I, LBB menentukan suatu Sistem Mandat untuk daerah-daerah yang berada pada teritorial Jerman dan Ottoman. Sistem itu mengatur bahwa daerah-daerah tersebut akan dikusai sementara oleh negara-negara pemenang perang. Untuk Palestina, sistem mandatnya diberikan kepada Inggris dan Inggris kemudian menepati janjinya terhadap Yahudi untuk menjadikan Palestina sebagai kampung halaman Yahudi. Walaupun pada saat itu bangsa Arab Palestina meminta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, Inggris menolaknya atas dasar pertimbangan ingin menjalankan ketetapan yang sudah diatur di dalam Deklarasi Balfour.<sup>78</sup>



**Gambar 3.1 Peta Alokasi Sistem Mandat di Timur Tengah**

Sumber: Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 85

<sup>77</sup> Jerome Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, *Political Science Quarterly*, 116:2 (Summer, 2001), h. 173.

<sup>78</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 81-83.

Pelaksanaan Deklarasi Balfour oleh Inggris telah memberikan kemudahan bagi Israel untuk meraih tujuannya dalam mendirikan Negara Israel di Palestina. Semenjak berakhirnya Perang Dunia I, Yahudi mulai secara intensif melakukan imigrasi ke Palestina. Imigrasi Yahudi ke Palestina yang setiap tahunnya semakin meningkat menimbulkan kecemasan dari Arab Palestina dengan mulai melakukan berbagai pemberontakan yang ditujukan tidak hanya kepada Yahudi tapi juga kepada pemerintahan Inggris. Namun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Palestina dapat dikatakan tidak berhasil. Dengan dukungan yang dimilikinya dari pemerintah Inggris, Yahudi semakin leluasa untuk melebarkan pemukimannya seiring dengan bertambahnya jumlah imigran Yahudi ke Palestina dari tahun ke tahun. Pemerintah Inggris kemudian mengajukan Rencana pemisahan (*partition plan*)<sup>79</sup> untuk menyelesaikan masalah ini namun ditolak oleh Arab Palestina. Penolakan ini dilakukan karena Arab Palestina bersikeras untuk memiliki wilayah Palestina secara keseluruhan.<sup>80</sup>

Ketika Perang Dunia II berlangsung, kedatangan pengungsi Yahudi Eropa ke Palestina semakin menambah kerumitan masalah antara Yahudi dan Arab Palestina. Pengungsi ini berdatangan karena adanya kekhawatiran terhadap tindakan Nazi yang ingin membinasakan bangsa-bangsa yang dipandang inferior olehnya untuk kemudian mengangkat derajat bangsa Arya sebagai bangsa dengan kedudukan tertinggi.<sup>81</sup> Konflik pun semakin memanas, karena bagi Arab Palestina, kedatangan para pengungsi ini akan menambah pemukiman Yahudi di Palestina. Penolakan ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan-pemberontakan lain yang ditujukan kepada Yahudi dan memicu terjadinya krisis di Palestina. Krisis yang terjadi diantara kedua bangsa ini ternyata tidak dapat diatasi oleh Inggris sebagai pemerintah yang memegang mandat atas Palestina semenjak berakhirnya Perang Dunia I. Pasca berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris secara resmi

<sup>79</sup> Rencana pemisahan yang dirancang oleh *Palestine Royal (Peel) Commission* pada bulan Juli tahun 1937. *Palestine Royal Commission* sendiri adalah bentukan *British Royal Commission of Inquiry* yang dipimpin oleh Lord Earl Peel. Komisi ini dibentuk untuk mengajukan proposal perubahan pada mandat Inggris terhadap Palestina seiring dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Palestina.

<sup>80</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 26.

<sup>81</sup> Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 167.

menyatakan mundur dari Palestina dan menyerahkan mandat Palestina kepada PBB.

PBB kemudian membentuk UNSCOP (*United Nations Special Committee on Palestine*) untuk melakukan investigasi dan kemudian menemukan solusi bagi penyelesaian masalah yang telah berlangsung semenjak abad ke-19 ini. UNSCOP merekomendasikan rencana pemisahan dengan membagi wilayah Palestina menjadi dua, untuk negara Arab dan negara Israel. Namun sekali lagi, masyarakat Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya tidak mendukung rencana pemisahan ini. Bangsa Arab yakin dengan diterimanya rencana pemisahan ini maka Israel akan mendapatkan legitimasi untuk mendirikan negara Israel di Palestina, sesuatu hal yang sedari dulu ditentang oleh masyarakat Arab Palestina dan negara-negara tetangga lainnya. Namun Yahudi mengambil langkah berani. Pada tanggal 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan negara Israel dengan wilayah teritorialnya adalah wilayah yang ditentukan oleh UN *Partition Plan*.<sup>82</sup> Pada tanggal 15 Mei 1948 Amerika Serikat mengakui negara Israel secara *de facto* dan diikuti oleh Uni Soviet yang mengakui kedaulatan negara Israel secara *de jure*. Di hari yang sama pula, pasukan dari negara-negara Arab menginvasi Palestina untuk menyerang negara Israel, memulai babak baru peperangan di Timur Tengah.<sup>83</sup>

### 3.3 Penyerangan Negara-Negara Arab

Konflik yang terjadi diantara masyarakat Arab Palestina dengan Israel kemudian melebar menjadi konflik antara Israel dan Arab ketika Arab menolak Rencana Pemisahan yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 dan pembentukan negara Israel pada tahun 1948.<sup>84</sup> Di tahun yang sama saat terbentuknya negara Israel, negara-negara Arab yang terdiri atas Irak, Syria, Libanon, Mesir, dan Jordania memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Palestina. Ada dua perang besar yang berlangsung yakni perang pertama, dari pertengahan Mei hingga 11 Juni 1948, ketika Arab melakukan invasi ke wilayah Yahudi namun berhasil dihentikan oleh Israel. PBB kemudian mengusahakan

<sup>82</sup> Fred Halliday, *The Middle East in International Relations*, United States of America: Cambridge University Press, 2005, h. 111.

<sup>83</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 200-201.

<sup>84</sup> Jerome Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, *Political Science Quarterly*, 116:2 (Summer, 2001), h. 171-172.

gencatan senjata diantara keduanya yang kelihatannya diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Gencatan senjata tersebut berakhir pada tanggal 6 Juli 1948 disebabkan ketidakinginan Syria dan Mesir untuk memperpanjang waktu karena mereka yakin akan memenangkan perang selanjutnya melawan Israel. Tetapi yang tidak disadari oleh Syria dan Mesir pada saat itu adalah militer Israel juga berada pada keadaan yang jauh lebih baik daripada negara-negara Arab dalam hal persenjataan dan struktur komando.<sup>85</sup>

Perang kedua berlangsung dari tanggal 6 hingga 19 Juli 1948 dimana Israel berhasil mengalahkan pasukan Arab dari segala sisi. Israel berhasil mengambil alih Galilea Barat yang masih termasuk wilayah Arab berdasarkan rencana pemisahan. Ketika PBB mengusahakan gencatan senjata kembali, Israel sudah berhasil memperluas daerah kekuasaannya melebihi apa yang diatur di dalam rencana pemisahan. Israel melakukan invasi ke daerah Negev pada bulan Oktober 1948 dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah Israel. Pada akhir tahun 1948 pasukan Israel bergerak menuju pantai timur Teluk Aqaba dan berhasil mengusir pasukan Jordania hingga Laut Merah.<sup>86</sup> Perang ini berakhir pada tahun 1949 dengan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Libanon, Jordania, dan Syria setelah PBB menjadi mediator untuk negosiasi gencatan senjata tersebut. Palestina sendiri, masyarakat mayoritas yang paling banyak mengalami kerugian akibat perang ini, tidak diikutsertakan di dalam kesepakatan tersebut.<sup>87</sup>

Walaupun kesepakatan gencatan senjata telah berjalan, perang tahun 1948 telah memberikan kerugian yang sangat besar pada bangsa Arab Palestina. Dari sekitar 860.000 Arab yang tinggal di Palestina, yang mana mulai kini disebut Israel, hanya 133.000 yang tetap ada. Sisanya telah mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan oleh Yordania dan Mesir serta ada juga yang menyebar ke daerah Libanon, Syria, dan Irak. Pasca perang 1948 pengungsi Palestina sebagian besar ditangani oleh negara-negara Arab hingga tahun 1960-an ketika gerakan nasional Palestina (PLO) terbentuk. Israel sendiri terus mengalami

---

<sup>85</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 201.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 201-203.

<sup>87</sup> Oren Barak, *The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2000*, Journal of Peace Research, 42:6 (Nov, 2005), h. 721.

peningkatan populasi dimana pada tahun 1949 jumlah populasi Israel telah mencapai satu juta orang. Pada tahun 1952, 325.000 Yahudi yang berasal Timur Tengah juga melakukan migrasi ke Israel sehingga semakin menambah jumlah populasi Yahudi di Israel. Kejadian ini seakan memberi suatu gambaran besar tentang akhir dari dominasi masyarakat muslim di bumi Palestina, yang sekarang disebut Israel, tersebut.<sup>88</sup>

Kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan tahun 1949 ternyata tidak mengarah pada kesepakatan damai dan bahkan perang diantara para pihak pun masih tetap berlanjut. Setidaknya ada 3 (tiga) perang besar yang terjadi antara Israel dengan negara-negara Arab pasca gencatan senjata 1949, yakni perang pada tahun 1956, 1967, dan 1973.<sup>89</sup> Pertama, perang pada tahun 1956 yang terjadi antara Israel dengan Mesir di Terusan Suez. Kegagalan atas perang di masa lalu dan ketidakpuasan Mesir terhadap nasib Palestina memicu tindakannya untuk tidak mengizinkan kapal-kapal yang akan menuju Israel melewati Terusan Suez. Tidak hanya Israel yang merugi atas tindakan Mesir ini, tapi juga Prancis dan Inggris yang menganggap Mesir telah menghalangi jalur perdagangan mereka. Akibatnya, pada bulan Oktober dan November tahun 1956, Israel dengan bantuan Prancis dan Inggris melakukan invasi ke Terusan Suez untuk mengakhiri penguasaan Mesir atas terusan tersebut sekaligus untuk menggulingkan pemerintahannya.<sup>90</sup> Invasi ini berakhir ketika Amerika Serikat berhasil menekan Israel, Prancis, dan Inggris untuk menarik mundur pasukannya pada bulan Maret 1957.<sup>91</sup>

Perang kedua pada tahun 1967 yang disebut juga sebagai Perang Enam Hari (*The Six-Day War*). Perang yang terjadi antara Israel melawan Mesir dan Syria di Semenanjung Sinai ini dipicu oleh dukungan Syria terhadap infiltrasi yang dilakukan oleh Fatah terhadap Israel. Israel yang merasakan adanya ancaman dari dukungan yang diberikannya Syria terhadap Palestina, memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan mengerahkan pasukannya untuk serangan balasan ke Syria. Walaupun telah mendapatkan dukungan penuh dari tentara Mesir, Syria

---

<sup>88</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 203-206.

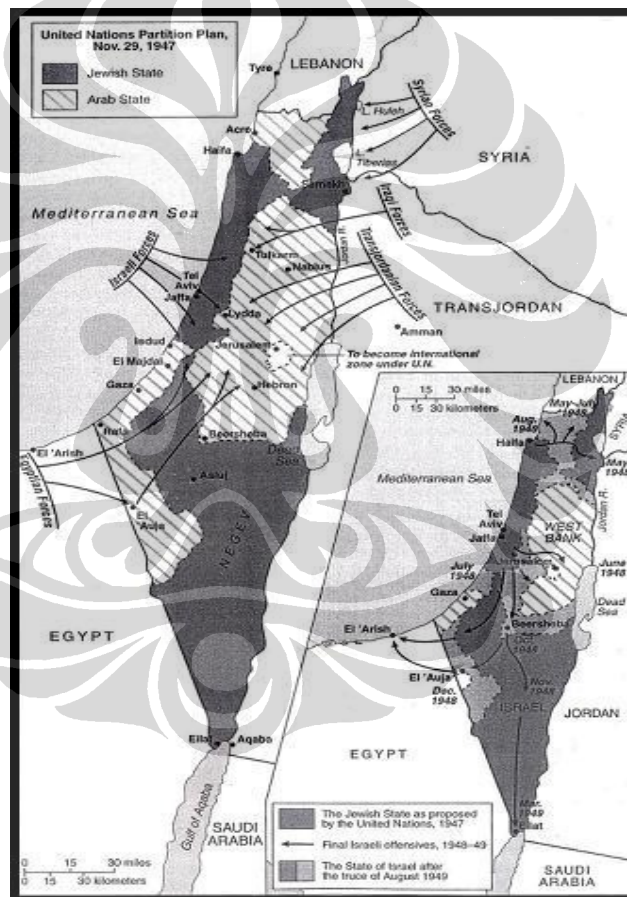
<sup>89</sup> Jerome Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, *Political Science Quarterly*, 116:2 (Summer, 2001), h. 172.

<sup>90</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 223-224.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 247.



tidak sanggup mengatasi perlawanan yang dilancarkan oleh Israel tersebut.<sup>92</sup> Melalui serangannya, Israel berhasil menduduki Semenanjung Sinai, Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan. Untuk mengakhiri perang ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 242 yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya, serta menghendaki penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di Timur Tengah serta menghormati hak negara-negara tersebut untuk hidup dalam damai.<sup>93</sup> Namun pada kenyataannya, keempat wilayah ini tetap menjadi jajahan Israel hingga dicapainya kesepakatan Camp David pada tahun 1979.<sup>94</sup>



**Gambar 3.2 Peta Wilayah Pendudukan Israel Pasca Perang 1967**

Sumber: Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 288.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 281-286

<sup>93</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 25.

<sup>94</sup> Jerome Slater, *A Palestinian State and Israeli Security*, *Political Science Quarterly*, 106:3 (Autumn, 1991), h. 412.

Dan ketiga, perang pada tahun 1973 antara Israel melawan Mesir dan Syria. Perang ini didasarkan atas keawatiran negara-negara Arab akan keberadaan permukiman Israel yang terus meningkat dan keinginan untuk membalas kegagalan mereka di masa lalu. Saat itu, negara-negara Arab sangat optimis akan memenangkan peperangan ini karena pasokan senjata Israel yang selama ini disediakan oleh Amerika Serikat semakin menurun. Atas dasar inilah Mesir dan Syria memutuskan untuk menyerang pemukiman Israel pada tanggal 6 Oktober 1973. Karena penyerangan ini bertepatan dengan Hari Suci Yahudi yakni Yom Kippur, maka perang ini pun disebut dengan Perang Yom Kippur. Namun Israel berhasil mengalahkan Mesir dan Syria bahkan menambah kekuasaan Israel ke daerah lainnya yakni Terusan Suez.<sup>95</sup> Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1973, untuk mengakhiri peperangan ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 338 yang menghendaki diadakannya negosiasi diantara pihak-pihak yang bertikai berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242.<sup>96</sup>

Walaupun peperangan-peperangan tersebut dimenangkan oleh Israel, tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang kalah namun juga dirasakan oleh kedua belah pihak. Atas prakarsa Amerika Serikat, yang secara aktif dilakukan oleh Menteri Luar Negerinya saat itu yakni Henry Kissinger, dihasilkanlah dua perjanjian penarikan mundur pasukan Israel dan Mesir (1974,1975) dan satu antara Israel dan Syria (1974). Amerika Serikat juga berjanji bahwa kesepakatan selanjutnya yang akan dibentuk antara Israel dan Mesir adalah kesepakatan perdamaian yang telah final.<sup>97</sup>

Melalui negosiasi Camp David yang diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 7 September 1978, dua kesepakatan pun berhasil diraih. Kesepakatan pertama adalah kesepakatan tentang penentuan masa depan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonomi penuh untuk masyarakat Palestina di bawah pengawasan Jordania.<sup>98</sup> Sedangkan kesepakatan kedua adalah perjanjian damai antara Israel

---

<sup>95</sup> Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 320-324.

<sup>96</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 25.

<sup>97</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 326-329.

<sup>98</sup> Oren Barak, *The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2000*, *Journal of Peace Research*, 42:6 (Nov, 2005), h. 721.

dan Mesir yang akan ditandatangani pada tahun 1979 yang didalamnya termasuk dikembalikannya Semenanjung Sinai yang telah dikuasai Israel semenjak perang tahun 1967.<sup>99</sup> Akhirnya pada bulan Maret tahun 1979, kesepakatan untuk perdamaian pun berhasil diraih untuk pertama kalinya antara Israel dan Mesir. Peristiwa ini merupakan perubahan yang sangat penting dalam hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kesepakatan perdamaian berikutnya.<sup>100</sup> Namun keadaan yang membaik antara Israel dan negara-negara Arab ini tidak diikuti dengan membaiknya keadaan para pengungsi Palestina. Hingga saat itu masih banyak pengungsi Palestina yang tinggal di tenda-tenda pengungsian tanpa adanya kejelasan tentang nasib mereka.

### 3.4 Perlawanan Palestina

Berbagai tekanan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina memicu keputusan Liga Arab untuk menciptakan suatu organisasi yang bergerak sebagai perwakilan masyarakat Palestina dan berjuang untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan Israel. Organisasi tersebut dikenal dengan sebutan *Palestine Liberation Organization* (PLO) pada tanggal 28 Mei 1964. Keputusan ini diambil saat berlangsungnya *Cairo Summit* dan menghasilkan keputusan Liga Arab untuk mensponsori pembentukan suatu organisasi yang dapat mewakili rakyat Palestina dan berjuang keras menuju kemerdekaan Palestina. Keputusan Liga Arab ini mengidentifikasi komitmen negara-negara Arab untuk menyelesaikan masalah Palestina. Para pemimpin Arab kemudian memutuskan untuk menunjuk Ahmad al-Shuqayri sebagai pemimpin PLO, seorang pengacara warga Palestina yang telah bertahun-tahun bekerja sebagai perwakilan Arab Saudi di PBB. Sedangkan pasukan pembebasan Palestina (*Palestinian Liberation Army*) diketahui berada di bawah komando pasukan gabungan Arab yang dikepalai oleh Mesir.<sup>101</sup>

Selain PLO ada organisasi lain yang diprakarsai oleh para pemuda Palestina yang dikenal dengan nama al-Fatah dan dibentuk pada tahun 1958. Fatah semula

---

<sup>99</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 360-361.

<sup>100</sup> Jerome Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, *Political Science Quarterly*, 116:2 (Summer, 2001), h. 172.

<sup>101</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 272.

adalah grup yang berisikan anak muda Palestina yang terbang ke Gaza ketika Negara Israel dibentuk. Beberapa tinggal di Kairo selama pertengahan tahun 1950-an dan mendominasi Liga Pelajar Palestina selama menghadiri perkuliahan di Universitas Kairo. Seluruhnya kemudian meninggalkan Kairo ketika terjadi perang di Terusan Suez. Mereka menetap di Kuwait dan mulai mempublikasikan suatu jurnal yang dikenal dengan nama *Our Palestine*. Pemimpin Fatah pada saat itu adalah Yassir Arafat dan organisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari Syria. Bagi Fatah dalam memperjuangkan kebebasan Palestina aksi militer harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan melalui dunia politik.<sup>102</sup>

Pada pertengahan tahun 1965, Fatah mulai melakukan penyerangan terhadap instalasi Israel dan mengembangkan rencana untuk melakukan teror terhadap masyarakatnya. Fatah mempercayai aktifitas ini dapat membantu didirikannya negara Palestina dengan menimbulkan ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab. Ancaman dari militer Israel akan menyatukan Arab untuk menghadapi mereka, memberikan kemenangan pada Arab dan kemudian akan membebaskan Palestina dari kekuasaan Israel. Pada bulan Februari 1969, melalui suatu pemilihan yang diselenggarakan Dewan Nasional Palestina, Fatah berhasil memenangkan pemilihan dan Yassir Arafat terpilih menjadi pemimpin PLO. Dengan kemenangan Fatah tersebut, Yassir Araf semakin memiliki kewenangan yang luas untuk menyebarkan semangat kebebasan untuk Palestina. Akhir tahun 1969, aktifitas PLO dalam melakukan serangan terhadap Israel semakin meningkat.<sup>103</sup> Pada tahun 1974, ketika dilangsungkannya *Fez Summit*, para pemimpin Arab memberikan pengakuannya terhadap PLO sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Palestina yang sah. Ketika banyaknya dukungan yang diberikan terhadap PLO, Israel kemudian menyatakan bahwa PLO adalah teroris dengan harapan dukungan dan bantuan untuk Palestina, terutama dari Amerika Serikat, dapat dihentikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pandangan Palestina sebagai teroris pun memudar. Akhir tahun 1980-an, PLO secara

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 273.

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 309.

meningkat mulai diterima sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat Palestina dan berdiri sendiri.<sup>104</sup>

Salah satu bentuk perlawanan masyarakat Palestina yang lain adalah gerakan perlawanan masyarakat muslim yang telah ada semenjak akhir tahun 1970-an. Gerakan ini melakukan pemberontakan untuk mengakhiri kekuasaan Israel atas wilayah Palestina dengan melakukan *Islamic Jihad* dan menyatakan bahwa jihad adalah perang suci untuk mengakhiri ideologi sekular asing sehingga dapat menggantikannya dengan agama Islam sebagai dasar kehidupan di dalam dunia Islam. Walaupun gerakan ini pada awalnya bekerja sama dengan Arafat dan Fatah di dalam perlawanannya terhadap Israel, mereka kemudian memutuskan untuk memisahkan diri setelah Arafat menyatakan pengakuannya terhadap Israel. Menurut mereka, Palestina perlu untuk dipulihkan melalui perjuangan senjata dan kemudian membentuk negara Islam baru, yang dimana berbeda dengan tujuan PLO untuk membentuk negara demokrasi. Dalam perkembangannya, gerakan perlawanan ini kemudian memutuskan untuk memperluas pengaruhnya pada dunia politik Palestina dengan membentuk suatu organisasi yang disebut Hamas pada bulan Februari 1988.<sup>105</sup>

Nasib Palestina mengalami pergolakan kembali setelah terbentuknya kesepakatan perdamaian antara Israel dan Syria pada tahun 1974 dan antara Israel dan Mesir pada tahun 1979. PLO tidak lagi mendapatkan bantuan dari negara-negara besar tersebut dan satu-satunya pilihan untuk PLO pada saat itu adalah beraliansi dengan Irak. Ketidakpastian nasib Palestina pun semakin bertambah ketika Jalur Gaza dan Tepi Barat yang seharusnya menjadi wilayah otonomi Palestina, sesuai kesepakatan Camp David 1979, belum juga diserahkan oleh Israel. Israel malah semakin sibuk menambah permukimannya di kedua daerah tersebut. Saat itu, PLO dapat dikatakan tidak memiliki pilihan militer yang lain dan tidak mempunyai pilihan strategi politik yang efektif untuk mempertahankan keberadaannya. Keadaan inilah yang kemudian memicu terjadinya Intifada yakni pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel pada

---

<sup>104</sup> Fred Halliday, *The Middle East in International Relations*, United States of America: Cambridge University Press, 2005, h.121.

<sup>105</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 425-426.

bulan Desember 1987.<sup>106</sup> Peristiwa Intifada yang diprakarsai oleh masyarakat Palestina sendiri memberikan dorongan kepada PLO untuk menegaskan kembali Negara Palestina.<sup>107</sup> Namun, akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan Palestina juga menyebabkan PLO harus mengubah jalur politiknya selama ini. Di akhir tahun 1988 PLO secara resmi memutuskan untuk menerima solusi dua negara (*partition plan*) yang berarti, selain ingin membentuk Negara Palestina, organisasi ini telah memberikan pengakuannya terhadap keberadaan Negara Israel.<sup>108</sup>

Intifada adalah ledakan kebencian dan frustrasi yang secara spontan muncul pada generasi muda dan golongan miskin Palestina. Kemarahan ini tidak hanya ditujukan kepada Israel tapi juga kepada pemimpin Palestina yang hingga saat itu belum juga berhasil memberikan kepastian terhadap wilayah dan masyarakat Palestina. Bagi golongan miskin Palestina, kekuasaan Israel semakin lama semakin menyudutkan mereka dengan pungutan pajak dan pengangguran yang terus bertambah. Israel juga masih senantiasa melakukan perampasan tanah terhadap mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki lahan untuk bekerja. Sedangkan untuk generasi muda Palestina, mereka tumbuh dan hidup di bawah kekuasaan serta perlakuan kasar Israel terhadap orang tua mereka yang disaksikan sendiri oleh mereka. Generasi muda ini juga sangat tidak mengerti ketika orang tua mereka tetap patuh pada aturan yang ditetapkan penjajah pada saat mereka sendiri telah dipermalukan. Ketika para orang tua masih berharap atas kepemimpinan PLO, para pemuda melihat bahwa harapan telah memudar seiring dengan penurunan kekuatan PLO.<sup>109</sup>

Intifada secara cepat menyebar dari Gaza ke Tepi Barat. Berbagai kekerasan pun terjadi seperti pelemparan batu, penembakan, penusukan, dan pelemparan bom, yang seluruhnya ditujukan ke Israel. Kelompok buruh dan komite wanita Palestina pun akhirnya bergabung dengan perlawanan ini. Alasan yang kemudian

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 414.

<sup>107</sup> Oren Barak, *The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2005*, *Journal of Peace Research*, 42:6 (Nov, 2005), h. 722.

<sup>108</sup> Jerome Slater, *Netanyahu, A Palestinian State, and Israeli Security Reassessed*, *Political Science Quarterly*, 112:4 (Winter, 1997-1998), h. 677.

<sup>109</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 414-415.

menyatukan berbagai golongan masyarakat Palestina ini didasarkan atas perlakuan Israel sendiri yang tidak pandang bulu terhadap mereka: "Siapa pun orangnya akan tetap disakiti karena kau orang Palestina." Masyarakat Palestina kemudian memboikot barang-barang Israel dan menolak untuk membayar pajak yang dibebankan Israel kepada mereka. Israel kemudian membalas pemberontakan ini dengan menutup suplai makanan ke desa-desa dan melakukan karantina penuh. Israel bahkan memberikan perintah kepada penembak jitu untuk membunuh orang-orang yang melakukan pelemparan batu. Akhir tahun 1989, diperkirakan 626 Palestina dan 43 Israel yang telah terbunuh, sekitar 37.439 Arab terluka, dan antara 35.000 hingga 40.000 ditahan.<sup>110</sup>

### 3.5 Krisis Teluk

Krisis teluk dimulai ketika Irak melakukan invasi terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Invasi ini didahului oleh konfrontasi diplomasi di pertengahan Juli 1990, dimana Irak mengancam akan menyerang Kuwait jika tidak bersedia menaikkan harga minyak. Kuwait dan *United Arab Emirates* (UAE) pada saat itu diketahui memiliki produksi minyak yang telah melebihi kuota. Hasil produksi ini menurut Irak telah menghalangi Irak untuk memperoleh keuntungan demi perbaikan perekonomiannya setelah berperang melawan Iran. Namun Kuwait menolak permintaan Irak tersebut.<sup>111</sup>

Ketika Irak menginvasi Kuwait, Amerika Serikat bertindak dengan cepat, yakni mengirimkan bantuan militer ke Arab Saudi serta mengirimkan Sekretaris Pertahanannya saat itu, Richard Cheney, untuk memperoleh kesepakatan yang pasti tentang jumlah pasukan Amerika Serikat yang perlu dikirim dan sekaligus mengajukan sidang darurat di PBB. Dewan Keamanan PBB mengutuk agresi yang dilakukan Irak tersebut dan pada tanggal 6 Agustus 1991 Presiden Bush memutuskan untuk menggulingkan Saddam Husein. Tindakan Amerika Serikat untuk segera menyelamatkan Kuwait ini sangat dimengerti mengingat adanya ketergantungan sekutu Amerika Serikat terhadap suplai minyak dari negara tersebut. Selain itu dibutuhkan tindakan yang sangat cepat untuk mencegah akses Soviet terhadap pasukan minyak Kuwait. Rencana militer yang akan dilakukan

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 424-425.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 431.

oleh Amerika Serikat adalah melindungi Arab Saudi dari serangan Irak dan kemudian memaksa Irak keluar dari Kuwait.<sup>112</sup>

Banyak dari negara-negara Arab yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Irak ini. Laporan tentang jumlah korban masyarakat Kuwait dan non-Kuwait yang bekerja di sana, terutama masyarakat Palestina, membuktikan bahwa Saddam telah berbohong dengan mengatakan bahwa serangannya tersebut demi Palestina. Ironisnya, satu-satunya pemimpin Arab yang membela aksinya hanyalah Yasir Arafat, yang berharap untuk menggunakan Saddam Hussein agar dapat menekan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun pada saat yang bersamaan, negara-negara Arab yang meminta agar Saddam Hussein untuk mundur, memiliki kecurigaan terhadap kehadiran pasukan Amerika Serikat karena adanya maksud atau kepentingan yang lain. Pendapat ini muncul sehubungan dengan *double standard* yang dilakukan Amerika saat itu: di satu sisi memveto keputusan Dewan Keamanan PBB untuk menghukum tindakan Israel yang berlebihan dalam menghadapi Intifada, di sisi lain menggunakan Dewan Keamanan untuk mendapatkan dukungan terhadap kehadiran pasukannya di Arab Saudi.<sup>113</sup>

Dengan adanya dukungan dari Dewan Keamanan PBB, dibentuklah pasukan gabungan yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengamankan Kuwait dari serangan Irak. Pasukan gabungan ini akhirnya berhasil merebut kembali Kuwait dan menghancurkan infrastruktur militer Irak melalui suatu operasi yang dilakukan semenjak 16 Januari 1991. Tak lama setelah itu gencatan senjata pun mulai diberlakukan pada tanggal 28 February 1991. Setelah krisis teluk berakhir, diketahui bahwa kerugian perang tidak hanya dirasakan oleh Kuwait tapi juga oleh Palestina sendiri. Banyak lapangan pekerjaan di Kuwait yang menjadi mata pencaharian masyarakat Palestina telah dihancurkan. Selain itu, dengan kekalahan Irak pada Perang Teluk, Palestina menjadi kehilangan dukungan finansial dan diplomatik yang selama dua dekade diberikan oleh Irak. Tragedi ini juga mengakibatkan PLO terpaksa berhutang pada berbagai institusi penting di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan negara-negara Arab yang lain.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 431-433.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 433.

<sup>114</sup> Phillip Mattar, *The PLO and the Gulf Crisis*, Middle East Journal, 48:1 (Winter, 1994), h. 31.



### 3.6 Israel dan Palestina Menuju Perdamaian

Kerugian yang dialami Palestina pasca Intifada dan Perang Teluk mengharuskan Palestina untuk mengubah sikap diplomatiknya terhadap Israel. Semenjak 1988, Arafat telah mengusahakan pengakuan dunia internasional terhadap proposal perdamaian yang diajukannya. Akhir tahun 1988, tepatnya di bulan Desember, usaha Arafat tersebut membuahkan hasil dengan memperoleh dukungan Washington yang berjanji akan mengusahakan penyelesaian pada konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina ini. Pada bulan yang sama, sekelompok warga Yahudi Amerika mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi PLO, termasuk Arafat, yang diadakan di Stockholm untuk mendorong terciptanya pemulihan hubungan yang baik antara Amerika Serikat dan PLO. Dialog ini diadakan atas dukungan Duta Besar Amerika Serikat di Tunis, dimana markas besar PLO berada, dan mempersiapkan masukan-masukan baru untuk proses menuju perdamaian.<sup>115</sup>

Dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat maka tekanan terhadap Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzak Shamir dari Partai Likud, sudah dapat diperkirakan. Shamir menanggapi tekanan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya akan mengadakan pemilihan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Rencana Shamir ini kemudian memperoleh dukungan dari Knesset<sup>116</sup> pada bulan May 1989 yang diberi nama "*Free and Democratic Elections.*" Pemilihan yang diperuntukkan bagi masyarakat Arab Palestina ini menurut dugaan akan mengarah pada otonomi yang dimana mereka akan memiliki otoritas (yang tidak diperincikan) pada urusan kehidupan sehari-hari mereka. Israel sendiri akan tetap mempertahankan pengawasan terhadap keamanan, hubungan luar negeri, dan segala aspek pada kebijakan yang berkaitan dengan para penduduk yang menetap di daerah tersebut.<sup>117</sup>

Rencana yang diajukan oleh Shamir ini sebenarnya dimaksudkan untuk menunda jalannya proses perdamaian, bukan untuk mempromosikannya, dan kemudian akan memberikan waktu bagi Israel untuk menguatkan posisinya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Bahkan ketika dikritik oleh Ariel Sharon, yang

<sup>115</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 427.

<sup>116</sup> Parlemen Israel, yang terbentuk semenjak tanggal 14 Februari 1949.

<sup>117</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 428.

merupakan salah satu pejabat penting dari Partai Likud, bahwa janji atas otonomi yang diberikan ke masyarakat Palestina akan mengarah pada kemerdekaan Palestina, Shamir membela dirinya dengan mengatakan bahwa rencana ini akan memberikan status quo pada daerah-daerah tersebut dimana status quo akan tiada jika kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan permanen. Sedangkan kesepakatan permanen yang dimaksudkan oleh Shamir adalah dijadikannya kedua daerah tersebut sebagai bagian dari Negara Israel. Shamir menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan status terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat dan Israel tidak akan pernah bernegosiasi dengan PLO, apalagi membiarkan Negara Palestina berdiri di daerah tersebut.<sup>118</sup>

Rencana Shamir ini tentu saja ditolak oleh masyarakat Palestina dan PLO. Walau begitu, Amerika Serikat menyambut baik rencana Shamir dengan menyatakan bahwa rencana ini menghubungkan antara pemilihan dan penyelesaian untuk mencapai status final bagi daerah-daerah yang diduduki oleh Israel pada negosiasi berikutnya. Pemerintahan Amerika Serikat saat itu, di bawah kepemimpinan George Bush, meramalkan dunia akan menyaksikan akhir dari pendudukan Israel terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Shamir, namun pemerintah Amerika Serikat memberikan waktu setahun padanya untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat agar dapat mendiskusikan rencana tersebut. Walau begitu, Amerika Serikat menerima keputusan Israel untuk tidak melibatkan PLO. Sesuai dengan perkiraan Israel, tidak ada warga Palestina yang turut berpartisipasi. Dan ini berarti akan memberikan waktu setahun lagi bagi Israel untuk menumpas Intifada dan menambah pemukiman-pemukiman baru.<sup>119</sup>

Dengan pengecualian terhadap PLO dan ketidakhadiran perwakilan Palestina untuk mendiskusikan rencana pemilihan tersebut, maka Amerika Serikat bersama Mesir berusaha keras mencari jalan keluar yang lain dan kemudian menetapkan bahwa warga Palestina yang diusir dari wilayah mereka atau yang menetap di Jerusalem Timur dapat bergabung di dalam tim negosiasi. Shamir menolak ketetapan ini dengan alasan Jerusalem Timur selamanya akan menjadi bagian dari Negara Israel sehingga perwakilan dari daerah tersebut tidak dapat dilibatkan.

---

<sup>118</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 428.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Namun Amerika Serikat berpendapat lain dengan mengatakan bahwa status Jerusalem Timur merupakan salah satu subyek yang akan dibicarakan di dalam negosiasi. Merasa frustrasi dengan sikap Shamir yang tidak mau kompromi, Bush memutuskan untuk mengambil sikap yang lebih keras. Pada tanggal 3 Maret 1990, Bush dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat menentang pembentukan permukiman yang dilakukan Israel di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur. Partai Buruh, yang didorong oleh Amerika, juga mengancam akan keluar dari koalisi jika poin-poin negosiasi yang telah ditentukan Washington, yang juga menyertakan status Jerusalem Timur, tidak diterima. Washington berharap dengan memecah koalisi di pemerintahan Israel maka Shamir berubah pikiran untuk menerima ketentuan negosiasi Amerika. Namun, Shamir ternyata tetap meneruskan pemerintahannya walaupun tidak satu pun Partai Buruh didalamnya. Pada tanggal 28 Juni 1990, Shamir secara resmi menyatakan menolak rencana untuk negosiasi yang diajukannya sendiri pada bulan Mei 1989.<sup>120</sup> Tindakannya ini menandai akhir dari rencana proses perdamaian antara Israel dan Palestina pasca Intifada. Ketidakmampuan Amerika Serikat inilah yang juga mendorong Arafat mulai mencari dukungan lain untuk melawan Israel.

Periode 3 (tiga) bulan, dari Mei hingga pertengahan Juni 1990, merupakan saat-saat yang sangat krusial dalam hubungan Palestina dan Israel. Tanpa kehadiran Partai Buruh dalam pemerintahannya, Shamir memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memperbanyak pembentukan permukiman-permukiman Yahudi di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur. Pada saat yang sama, Yassir Arafat yang telah dikritik atas kebijakannya untuk melakukan hubungan baik dengan Israel, menebus kesalahan dan kegagalannya dengan mulai memperkuat hubungan dengan Irak. Dia berharap dapat mendorong terjadinya negosiasi berdasarkan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata daripada dengan perdamaian yang didukung oleh Mesir.<sup>121</sup> Atas dasar inilah, selama Perang Teluk berlangsung, hanya Arafat satu-satunya pemimpin Arab yang mendukung penyerangan Irak ke Kuwait.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, h. 428-429.

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 429.

Pasca Perang Teluk, kekalahan yang dialami Irak oleh Amerika Serikat juga cukup memermalukan Yassir Arafat yang selama ini mendukung Irak dan akhirnya mengisolasi dirinya dari pergaulan Dunia Arab. Dampak krisis teluk menjadikan Palestina semakin merasa perlu untuk mulai melakukan pembicaraan serius dengan Israel agar dapat menghasilkan kesepakatan damai.<sup>122</sup> Selain itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk memperbaharui usahanya dalam penyelesaian masalah Arab-Israel. Sekteraris Negara Amerika Serikat, James Baker, diketahui melakukan kunjungan ke Timur Tengah pada Maret dan April 1991. Negara-negara Arab, terutama Syria, menginginkan diadakannya konferensi internasional yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Soviet untuk mengawasi jalannya negosiasi langsung dengan Israel yang membahas tentang pengembalian Dataran Tinggi Golan.

Pada saat yang bersamaan partai Likud mendorong pemerintah Israel untuk setuju mengikuti konferensi Internasional dan meminta agar segera dilakukan *face-to-face talks* dengan Syria. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemungkinan akan terjadinya penolakan pemerintah Amerika Serikat untuk mendanai pembuatan rumah bagi Yahudi jika Israel tidak ikut dalam konferensi tersebut. Baker dengan gigih terus mengusahakan dilakukannya suatu konferensi dan akhirnya pada bulan Juli tahun 1991 dia memperoleh persetujuan dari Syria, Libanon, dan Jordania untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Israel dan bertemu di Madrid. Seluruh kegiatan tersebut akan disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sama seperti rencana proses perdamaian sebelumnya, PLO tetap tidak diikutsertakan di dalam konferensi ini.<sup>123</sup>

*Madrid Talks* dimulai pada akhir bulan Oktober 1991. Konferensi ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) ronde sebelum akhirnya didahului oleh kesepakatan antara Israel dan Palestina pada bulan September 1993. Konferensi ini tidak menghendaki para pesertanya bertemu semua secara bersama, tetapi pertemuan para peserta diatur secara terpisah yang terdiri atas beberapa panel. Delegasi Israel secara terpisah bernegosiasi dengan negara-negara Arab seperti Libanon, Syria, serta delegasi gabungan Jordania dan Palestina dimana Jordania

---

<sup>122</sup> Gerald M. Steinberg, *Unripeness and Conflict Management: Re-Examining the Oslo Process and its Lessons*, Israel: Bar Illan University, 18 June 2002, h. 2.

<sup>123</sup> Charles D. Smith, *op.cit.*, h. 435.

menaungi delegasi Palestina sebagai bagian dari delegasi Jordania. *Madrid Talks* mengalami sedikit kemajuan untuk menangani kasus antara Israel dan negara-negara Timur Tengah yang bersengketa dengannya, tetapi tidak untuk kasus antara Israel dan Palestina. Penyelesaian masalah Israel dan Palestina pada saat itu sangat ketinggalan jauh atau bahkan dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan. Masyarakat Palestina, dengan persetujuan PLO, bersikeras untuk menentukan nasibnya sendiri, yang berarti pendirian Negara Palestina, sebagai hasil akhir dari kesepakatan. Sedangkan Israel setuju untuk memberikan otonomi kepada masyarakat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dimana Israel tetap melakukan pengawasan terhadap wilayah tersebut.<sup>124</sup>

Walaupun telah terjadi pergantian pemerintahan yang kini dikuasai oleh Partai Buruh, Israel tetap tidak menahan tindakannya untuk pembangunan permukiman baru di Dataran Tinggi Golan dan sekitar Yerusalem. Karena belum adanya kata sepakat antara Israel dan Palestina, ketegangan diantara kedua belah pihak pun semakin meningkat. *Madrid Talks* tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pihak sponsor. Peningkatan ketegangan diantara kedua belah pihak mengingatkan Israel dan Palestina akan dampak dari peristiwa kebangkitan rakyat Palestina dalam Intifada serta dampak dari Perang Teluk. Selain itu, kekhawatiran Israel terhadap bahaya yang tengah mengancam dirinya di wilayah Arab semakin bertambah ditandai dengan meningkatnya penggunaan misil balistik, senjata kimia, dan biologi pasca terjadinya kedua peristiwa besar tersebut.<sup>125</sup> Atas dasar itulah, usaha perdamaian kembali diupayakan oleh Israel dan Palestina dengan melakukan berbagai cara, termasuk melakukan negosiasi secara rahasia pada proses negosiasi yang berikutnya, yakni negosiasi Oslo.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, h. 436.

<sup>125</sup> Gerald M. Steinberg, *op.cit.*, h. 2.

## BAB 4

### OSLO AGREEMENT

Bab ini merupakan pembahasan mengenai Oslo Agreement antara Israel dan Palestina dimana akan diberikan penjelasan tentang keterlibatan Norwegia, proses negosiasi Oslo, dan Oslo Agreement sebagai harapan baru untuk perdamaian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang awal keterlibatan Norwegia sebagai tuan rumah dan mediator negosiasi Oslo. Bagian kedua akan memberikan penjelasan tentang proses negosiasi Oslo serta para pihak dan peristiwa yang mengiringi jalannya proses negosiasi Oslo tersebut. Dan terakhir, bagian ketiga akan menjelaskan tentang hubungan Israel dan Palestina serta negara-negara Timur Tengah lainnya ketika harapan untuk perdamaian terbangun dengan adanya Oslo Agreement. Penjelasan bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang singkat namun efektif mengenai jalannya proses negosiasi Oslo yang walaupun dilakukan secara tertutup namun berhasil mencapai kesepakatan penting diantara Israel dan Palestina disaat kesepakatan-kesepakatan lain sulit untuk mewujudkan hal tersebut.

Setelah terjadinya perubahan eskalasi konflik pasca Intifada dan Perang Teluk, baik Israel dan Palestina percaya bahwa telah tiba saatnya bagi kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian diantara mereka. *Madrid Talks* hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Namun ternyata, proses perdamaian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Soviet ini belum berhasil membuahkan kata sepakat antara Israel dan Palestina. *Madrid Talks* belum dapat menangani konflik diantara kedua belah pihak, bahkan dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan. Hal inilah yang kemudian memicu keinginan Israel dan Palestina untuk mengadakan negosiasi lain, yakni negosiasi Oslo.

Negosiasi Oslo berlangsung selama 8 (delapan bulan) dengan 12 (dua belas) sesi dimana kesemuanya diselenggarakan di Norwegia. Ada 2 (dua) hal yang menjadi pertanyaan oleh publik pada waktu itu yakni keterlibatan Norwegia dan penyelenggaraan negosiasi yang dilakukan secara tertutup. Mengenai Norwegia, publik menyadari betul bahwa pada saat yang bersamaan ada negosiasi lain yang

sedang dijalankan di Washington yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat dan Soviet. Lalu bagaimana negara sekecil Norwegia dapat lebih jauh terlibat di dalam proses perdamaian Israel-Palestina dan bahkan dapat membantu menghasilkan suatu kesepakatan damai. Apa yang telah dilakukan oleh Norwegia ini seakan-akan telah "melangkahi" Amerika Serikat yang telah lama bertindak sebagai promotor pada berbagai proses perdamaian di Timur Tengah.

Penyelenggaraan negosiasi Oslo yang dilakukan secara tertutup juga sedikit banyak menjadi pembicaraan saat itu. Bagaimana publik tidak menyadari berbagai pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan di Oslo dan bagaimana sebenarnya proses negosiasi ini berlangsung hingga tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, adalah hal yang dipertanyakan oleh berbagai pihak. Keberhasilan negosiasi tertutup di dalam meraih kesepakatan damai adalah sesuatu yang luar biasa karena saat itu pencapaian ini terbukti belum dapat diraih melalui negosiasi terbuka yang juga diselenggarakan di waktu yang bersamaan. Kesepakatan damai ini adalah suatu kesepakatan yang telah lama dinanti, dimana diharapkan dapat mengakhiri konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung sekian puluh tahun lamanya.

#### **4.1 Keterlibatan Norwegia**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan Norwegia sebagai mediator dalam proses negosiasi antara Israel dan Palestina merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan, mengingat telah banyak pihak lain yang juga mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut tetapi gagal. Ketika Partai Buruh baru saja memenangkan pemilihan umum, Perdana Menteri terpilihnya, Yitzak Rabin, menyadari bahwa Israel membutuhkan perdamaian. Tidak hanya Rabin yang menyadari hal tersebut, tapi juga rivalnya, Simon Peres, yang kemudian diangkat oleh Rabin untuk menjadi Menteri Luar Negeri Israel. Namun hubungan segitiga antara Israel-Palestina-Norwegia bermula dari Yossi Beilin, Wakil Menteri Luar Negeri Israel. Beilin adalah orang Israel yang pertama

kali menyadari perlunya untuk bernegosiasi langsung dengan PLO namun saat itu tidak banyak orang yang memperdulikannya.<sup>126</sup>

Awal tahun 1992, Beilin berkenalan dengan Terje Rod Larsen, direktur dari *Norwegian Institute for Applied Science* atau dikenal dengan singkatan FAFO. Larsen berada di Timur Tengah karena istrinya, diplomat Mona Juul, ditempatkan di kedutaan besar Norwegia di Kairo. Selama tahun 1991-1992, Larsen terlibat dalam proyek penelitian di Gaza dan Tepi Barat dimana proyek tersebut berhubungan dengan pemeriksaan kondisi kehidupan masyarakat Palestina.<sup>127</sup> Sebelum tahun 1992, Beilin juga berkenalan dengan Jan Egeland, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia dari Partai Buruh Norwegia. Sebagai salah satu aktivis dalam Partai Buruh Israel, Beilin bertemu dengan Mashov Caucus, seorang progresif yang bekerja pada Divisi Isu-Isu Sosial di Partai Buruh. Melalui Caucuslah Beilin diperkenalkan kepada Prof. Yair Hirschfeld, seorang akademisi Israel. Hirschfeld membawa Beilin untuk melakukan pekerjaan yang menghubungkan dirinya secara informal dengan pemimpin-pemimpin Palestina di Jerussalem Timur dan Tepi Barat, termasuk Faisal al-Husseini dan Dr. Hanan Ashrawi. Selama menjadi aktivis Beilin juga sering mengadakan dan menghadiri beberapa dialog tertutup dengan pemimpin-pemimpin Palestina, yang walaupun ketika dia telah bekerja sebagai Sekretaris Kabinet dan sebagai Wakil Menteri Keuangan di pemerintahan Israel, hal-hal tersebut masih sering dilakukannya.<sup>128</sup>

Pada tahun 1990, Beilin menjadi anggota Knesset, dan selama keanggotaannya tersebut Beilin tetap melanjutkan usahanya mencari jalan untuk proses perdamaian. Ia menghubungi pemimpin-pemimpin Palestina di tahun 1990 dan 1991, termasuk Sari Nusseibeh, seorang akademisi yang bekerja untuk PLO di Jerussalem, Faisal al-Husseini dan lainnya. Tujuan Beilin dalam menghubungi orang-orang tersebut adalah untuk membentuk rancangan naskah protokol yang akan memandu negosiasi damai antara Palestina dan pemerintah Israel. Namun usaha yang dilakukan oleh Beilin ini pun kembali gagal untuk kedua kalinya disebabkan krisis yang melanda Timur Tengah pada saat itu, yakni invasi Irak

<sup>126</sup> Hilde Henriksen Waage, *Explaining the Oslo Backchannel: Norway's Political Past in the Middle East*, *The Middle East Journal*, 56:4 (Autumn, 2002), h. 599.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Anthony Wanis-St.John, *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*, United States: Tufts University, April 2001, h.155.



terhadap Kuwait. PLO sendiri pada bulan Januari dan Agustus 1992, melalui Abu Ala' (bendaharawan PLO) dan Bassam Abu Sharif (ajudan Arafat), meminta pemerintah Norwegia untuk memfasilitasi negosiasi antara Israel dan Palestina. Pemerintah Norwegia menyampaikan permintaan PLO ini kepada duta besar Israel di Norwegia, tetapi langsung ditolak tanpa dilakukannya konsultasi dengan para pemimpin politik Israel di Jerusalem dan Tel Aviv.<sup>129</sup>

Ide tentang keterlibatan Norwegia sebagai mediator pada proses negosiasi mulai muncul untuk pertama kalinya di tahun 1979, dalam hubungannya dengan *Camp David Agreement*. Pemerintah Amerika Serikat meminta Norwegia untuk menjamin pengiriman minyak ke Israel sebagai pengganti pengiriman minyak dari Iran. Bagi pemerintah Norwegia permintaan ini menciptakan beberapa dilema karena di saat yang bersamaan Arafat telah meminta Norwegia untuk menjalankan perannya sebagai mediator. Namun ternyata Arafat tidak keberatan dengan pengiriman minyak yang dilakukan oleh Norwegia ke Israel. Hanya saja Arafat mengajukan satu syarat yakni dia menginginkan bantuan dari Norwegia jika suatu saat dia membutuhkan *secret back channel* dengan Israel. Israel sendiri pada saat itu masih dibawah kepemimpinan Partai Likud dan tidak berkeinginan melakukan apapun dengan PLO. Perdana Menteri Norwegia saat itu, Knut Frydenlund, menyambut positif keinginan Arafat ini dan bersedia untuk melakukan *back channel* jika saatnya nanti tiba. Keinginan Arafat untuk menggunakan Norwegia sebagai mediator proses negosiasi antara Israel dan Palestina juga dikarenakan Norwegia memiliki hubungan erat dengan Israel. Menurut Arafat, keterlibatan Norwegia dapat dikatakan penting karena dapat membantu PLO dalam meyakinkan Israel untuk bernegosiasi. Selain itu Norwegia juga memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, sesuatu yang menurut Arafat sangat dibutuhkan.<sup>130</sup>

FAFO pada awal tahun 1990 melakukan penelitian terhadap kondisi kehidupan di Gaza dan Tepi Barat. Selama FAFO melakukan penelitian tersebut, Larsen sering berhubungan dengan masyarakat Palestina dan Israel, serta mulai mengetahui pokok permasalahan dari konflik Israel dan Palestina kekurangan dari proses perdamaian Madrid. Dia mulai percaya bahwa FAFO dapat menyediakan

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 156-158.

<sup>130</sup> Hilde Henriksen Waage, *op.cit.*, h. 603.

tempat yang sempurna untuk pertemuan rahasia antara Israel dan Palestina. FAFO dapat berdalih bahwa pertemuan yang nantinya melibatkan orang-orang penting dari Israel dan Palestina merupakan salah satu kegiatan dari proyek penelitian FAFO. Pada tanggal 29 Mei 1992, Larsen bertemu dengan Yossi Beilin dan mengajukan proposal bahwa FAFO dapat digunakan sebagai penghubung untuk negosiasi rahasia antara Partai Buruh Israel dan PLO. Larsen juga mengajukan proporsal yang sama kepada Faisal al-Husayni. Tak lama kemudian, Beilin menghubungkan Larsen dengan Hirschfeld yang telah memiliki jaringan dengan Palestina. Istri Larsen, Mona Juul, adalah Direktur dari kantor Deputy Kementerian Luar Negeri Norwegia Jan Egeland. Dengan posisinya tersebut, Mona Juul telah mempermudah kedatangan PLO ke Norwegia yang dipimpin oleh Abu Ala' pada bulan Januari 1992. Abu Ala' menyatakan kepada Juul dan Larsen bahwa dia berkeinginan dan bersedia untuk bernegosiasi langsung dengan Israel. Segitiga antara FAFO-Partai Buruh-PLO pun terbentuk. Hanya yang kurang disini adalah bagaimana mendapatkan persetujuan dari pemerintah Israel, mengingat isinya tidak hanya berasal dari Partai Buruh tapi juga Partai Likud.<sup>131</sup>

Pada tanggal 23 Juni 1992, Partai Buruh memenangkan pemilu di Israel dan menjadikan Yitzak Rabin sebagai Perdana Menteri. Dengan kepemimpinan Partai Buruh di pemerintahan Israel, maka keberlanjutan negosiasi Oslo akan lebih pasti kedepannya. Tanggal 9 September 1992, Jan Egeland berkunjung ke Israel untuk bertemu dengan Beilin, yang sekarang bekerja sebagai Deputy Kementerian Luar Negeri Israel, untuk meninjau kembali ide tentang pelaksanaan negosiasi rahasia di Oslo. Egeland juga menyatakan kepada Beilin bahwa Menteri Luar Negeri Norwegia Thorvald Stoltenberg (yang kemudian digantikan oleh Johan Jorgen Holst di bulan April 1993), mendukung FAFO untuk menjadi tuan rumah bagi negosiasi ini dan akan memberikan dukungan baik politik maupun keuangan terhadap keberlangsungan negosiasi ini.<sup>132</sup> Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Norwegia dan FAFO ini telah memberikan kemudahan dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Kini hubungan segitiga antara Israel-PLO-Norwegia tidak hanya terbentuk tapi juga siap untuk dijalankan.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 158-159.

<sup>132</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 161.

## 4.2 Proses Negosiasi Oslo

Proses negosiasi Oslo diantara Israel dan Palestina terbagi atas dua tahap. Tahap pertama adalah tahap dimana telah ada perwakilan resmi dari PLO, namun belum ada perwakilan resmi dari Israel. Sedangkan tahap kedua adalah tahap dimana telah ada perwakilan resmi baik dari PLO maupun dari Israel.

### 4.2.1 Tahap Pertama

Partisipasi Israel pada tahap ini belumlah resmi dan hanya berdasarkan bimbingan/petunjuk dari Yossi Beilin, dan akhirnya mendapat dukungan dari Shimon Peres dan Yitzak Rabin. Menurut perspektif para pembuat kebijakan di Israel saat itu, negosiasi Oslo merupakan operasi bebas yang dijalankan oleh Beilin yang secara perlahan-lahan mengilhami/memberi inspirasi pemerintah Israel untuk berdamai dengan Palestina melalui negosiasi ini.<sup>133</sup>

**Ronde pertama** berlangsung pada tanggal 20 Januari 1993, dua orang akademisi Israel, Dr. Yair Hirschfeld serta Dr. Ron Pundak, bertemu dengan delegasi dari Palestina yakni bendaharawan PLO, Abu Ala', di salah satu kota kecil Norwegia, Sarpsborg. FAFO menciptakan persembunyian yang sempurna bagi proses negosiasi ini dengan mengatakan bahwa pertemuan ini hanyalah pertemuan akademik yang membicarakan tentang kondisi ekonomi di Gaza. Dengan demikian, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan<sup>134</sup>, para negosiator dapat menyangkal keterlibatannya pada negosiasi Oslo.<sup>135</sup> Para negosiator secara antusias memulai diskusi mereka dan pada mulanya hanya menyetujui penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza. Kemudian mereka menyetujui kebutuhan untuk memfasilitasi "*mini-Marshall Plan*" untuk bantuan internasional dan investasi di wilayah Palestina, serta kebutuhan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antara Israel dan Palestina.<sup>136</sup>

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>134</sup> Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut salah satu contohnya adalah kegagalan dalam menghasilkan suatu kesepakatan. Negosiasi rahasia memungkinkan para negosiator untuk menyelamatkan harga diri mereka dari kegagalan dengan menyangkal keberadaan negosiasi tersebut.

<sup>135</sup> Hilde Henriksen Waage, *Explaining the Oslo Backchannel: Norway's Political Past in the Middle East*, *The Middle East Journal*, 56:4 (Autumn, 2002), h. 600.

<sup>136</sup> Anthony Wanis-St.John, *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*, United States: Tufts University, April 2001, h. 167.

Negosiator Palestina bekerja berdasarkan rancangan naskah deklarasi yang disiapkan oleh Abu Mazen.<sup>137</sup> Draft yang disiapkan oleh Abu Mazen memuat perbedaan status sementara dan permanen, menyatakan kewenangan Palestina selama status sementara diberlakukan terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan ruang lingkup kewenangan akan dinegosiasikan kemudian. Abu Mazen juga meminta dibentuknya "Komite Bersama Israel-Palestina" untuk membicarakan isu-isu terkini serta meminta dibentuknya peradilan ad hoc yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jordania, Israel, dan Palestina apabila terjadinya perselisihan antara Israel dan Palestina ketika membicarakan isu-isu tersebut.

Para negosiator memulai pembicaraan tentang komponen-komponen yang akan diatur di dalam rancangan naskah *Declaration of Principles* pada **ronde kedua** di Norwegia tanggal 11-12 Februari 1993. Palestina membicarakan tentang batasan yurisdiksi pemerintahan mandiri Palestina, sedangkan Israel berpendapat bahwa selama berada di dalam status sementara kekuasaan Palestina tidak dapat diperluas ke seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza karena ketentuan tersebut akan termasuk permukiman Israel dan Jerussalem. Israel kemudian menghendaki agar kesepakatan tentang status final dinegosiasikan secara terpisah. Hirschfeld bersikeras bahwa kewenangan pemerintahan mandiri Palestina dapat dimulai dari Gaza dan secara perlahan-lahan dapat melebar ke Tepi Barat tapi tidak ke Jerussalem.<sup>138</sup>

Diantara ronde kedua dan ketiga, dimana keseriusan dari pihak PLO semakin terlihat, Beilin berpendapat bahwa ini saatnya untuk mencari legitimasi terhadap proses negosiasi di Oslo. Dia memutuskan untuk memberikan rancangan naskah kesepakatan kepada Menteri Luar Negeri Peres, dan menginformasikan keberadaan negosiasi Oslo kepada Peres untuk pertama kalinya. Peres kemudian menginformasikan langsung kepada Rabin dan menyatakan bahwa negosiasi Oslo setidaknya beresiko kecil karena tidak adanya komitmen Israel secara resmi. Rabin kelihatan tidak tertarik dengan

---

<sup>137</sup> Penasehat senior Arafat, yang dikenal juga dengan nama Mahmud Abbas. (Diperoleh dari: Anthony Wanis-St.John, *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*, United States: Tufts University, April 2001, h. 167).

<sup>138</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 167-168.

negosiasi ini tapi juga tidak melakukan apapun untuk menghentikan negosiasi Oslo. Rabin tidak ingin negosiasi Oslo menggantikan negosiasi yang tengah berlangsung di Washington.<sup>139</sup> Negosiasi resmi di Washington tidak mengalami kemajuan karena ketidakhadiran PLO sehubungan dengan pengusiran yang dilakukan oleh Rabin terhadap 415 anggota Hamas pada tanggal 17 Desember 1992, sebagai akibat dari pembunuhan yang dilakukan Hamas terhadap pasukan Israel dan pembunuhan masyarakat sipil Palestina oleh IDF.<sup>140</sup>

Dengan harapan untuk menyelamatkan dirinya dari pemerintahan baru Amerika Serikat, Rabin berkeinginan untuk menggunakan negosiasi Oslo agar dapat mendorong dilanjutkannya pembicaraan di Washington yang sempat tertunda. Agar dapat meyakinkan Palestina untuk kembali berpartisipasi pada *Washington Talks*, Rabin memerintahkan Peres untuk terlibat di dalam negosiasi Oslo. Peres dan Ephraim Sneh sebagai wakil dari Israel, dan Faisal al-Husayni dan Hanan Ashrawi sebagai wakil dari Palestina bertemu sebanyak 4 (empat) kali secara rahasia, namun mereka masih tidak memperoleh komitmen Palestina untuk kembali ke *Washington Talks*.<sup>141</sup>

Pada saat inilah, para pembuat kebijakan Israel dan Palestina menyadari bahwa mereka membutuhkan dua jalur negosiasi yang dilakukan secara struktural (tidak hanya alternatif), yakni satu adalah negosiasi rahasia yang berlangsung di Oslo dan satunya lagi adalah negosiasi terbuka yang dilakukan di Washington. Setelah adanya kesadaran untuk melakukan dua jalur negosiasi, para pembuat keputusan kini menggunakannya sesuai dengan strategi yang ada, yang terdiri atas manipulasi terhadap informasi, para negosiator, dan instruksi-instruksi yang mereka berikan dalam ruang lingkup masing-masing bentuk negosiasi.<sup>142</sup>

Pada **ronde ketiga** negosiasi yakni tanggal 20-21 Maret 1993, delegasi dari kedua belah pihak telah menghasilkan satu pasal bagi naskah *Declaration*

<sup>139</sup> Masih merupakan serangkaian dari *Madrid Talks*, namun dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeda, tidak hanya Madrid. Pada tahun 1993, *Madrid Talks* tersebut diselenggarakan di Washington.

<sup>140</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 168.

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 168-169.

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 169.

*of Principles* mengenai persetujuan keterlibatan masing-masing pihak. Perkembangan dari negosiasi Oslo pada waktu itu tidak ada yang luar biasa, dimana hanya menghasilkan kesepakatan Rabin untuk melanjutkan partisipasi Israel pada negosiasi Oslo. Di Norwegia sendiri sedang terjadi pergantian kabinet, dimana Thorvald Stoltenberg melepaskan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri sehubungan dengan penunjukannya oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Yugoslavia. Dia kemudian digantikan oleh Johan Jorgen Holst pada awal bulan April 1993.<sup>143</sup>

Pada **ronde keempat** yang diselenggarakan tanggal 30 April 1993, para peserta menegosiasikan keinginan Israel untuk memperluas elemen-elemen yang terdapat di dalam rancangan naskah deklarasi dan untuk menemukan mekanisme yang tepat agar Amerika Serikat bersedia mengadopsi naskah yang dihasilkan dari negosiasi Oslo. Israel menekankan bahwa negosiasi Oslo dilakukan untuk memberikan masukan ke Washington, tidak untuk menggantikan Washington. Konsep "*Gaza and Jericho First*" dibawa kembali oleh negosiator Palestina selama ronde ini, yang menginginkan implementasi otonomi Palestina secara perlahan-lahan terhadap Gaza dan Tepi Barat. Konsep ini merupakan perluasan dari konsep "*Gaza First*" dan untuk menguji keseriusan Israel untuk melakukan penarikan mundur pasukannya dari Tepi Barat.<sup>144</sup> Pilihan Arafat pada kota kecil yang berada di Tepi Barat kelihatannya tidak penting, namun bagi Arafat daerah tersebut merupakan simbol kepemilikannya atas seluruh Tepi Barat.<sup>145</sup>

**Ronde kelima** diadakan pada tanggal 8-9 Mei 1993 dimana mendiskusikan tentang kemajuan Israel dalam membangun persetujuan internal pada rancangan naskah deklarasi, namun Israel kemudian mengabarkan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan. Hirschfeld dan Pundak, walaupun mereka didukung oleh Rabin dan Peres, masih terisolasi dari para pembuat keputusan di level kebijakan. Mereka diminta untuk menghindari diskusi tentang rancangan naskah *Declaration of Principles* dan ironisnya mereka juga diminta untuk mengutamakan *Washington Talks*.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 170.

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 170.

<sup>145</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 31.

Namun di sisi yang lain, negosiator Israel menyampaikan rasa puas Rabin terhadap komitmen PLO terhadap negosiasi Oslo dan juga mengindikasikan bahwa Rabin akan mengalihkan perhatiannya dari negosiasi Israel-Syria ke negosiasi Israel-Palestina.<sup>146</sup> Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan negosiasi dengan Palestina, Rabin dihadapkan pada dua pilihan yakni berdamai dengan Palestina atau berdamai dengan Syria. Rabin merasa kesulitan untuk berdamai dengan Syria karena menghendaki Israel untuk melakukan penarikan mundur pasukannya dari Dataran Tinggi Golan. Hal ini tentu saja sulit untuk dilakukan oleh Israel mengingat banyaknya jumlah permukiman Israel di daerah tersebut.<sup>147</sup>

Kembali ke negosiasi Oslo, delegasi Israel merasa bahwa mereka tidak dapat kembali ke Oslo tanpa mendiskusikan rancangan naskah deklarasi yang tertahan karena sedang dipelajari oleh Peres dan Rabin. Naskah tersebut sangat luas dan telah meraih penyelesaian melebihi pencapaian negosiator Israel dan Palestina di Washington. Naskah deklarasi tersebut yang terdiri atas dua usulan: pertama, menetapkan masyarakat Jerussalem Timur untuk berpartisipasi sebagai kandidat dan pemilih dalam pemilihan umum Palestina; kedua, membagi proses perdamaian ke dalam dua tahap yakni tahap sementara dan permanen. Tahap permanen meliputi kesepakatan tentang politik Jerussalem, pengungsi Palestina, kedaulatan, garis batas negara dan keamanan. Penentuan wilayah yang akan dikuasai oleh Palestina selama periode sementara, secara spesifik tidak dijelaskan di dalam naskah tersebut.<sup>148</sup>

#### 4.2.2 Tahap Kedua

Pada tahap kedua dari proses negosiasi Oslo, delegasi Israel menambahkan 2 (dua) pejabat resmi pemerintah dalam keanggotaannya sebagai balasan atas permintaan Palestina untuk menunjukkan komitmen Israel pada negosiasi Oslo serta sesuai dengan keinginan Rabin dan Peres untuk melengkapi *Washington Talks* dengan negosiasi Oslo. Tahap kedua dari proses negosiasi Oslo ini dicirikan dengan adanya status resmi dari delegasi

---

<sup>146</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 170-171.

<sup>147</sup> Avi Shlaim, *op.cit.*, h. 28.

<sup>148</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 171-172.

Palestina dan Israel. Pada tahap ini pula negosiasi Oslo dijalankan dengan lebih serius dan fokus kepada penyelesaian masalah, bertahan dari krisis, dan menghindari adanya *brinkmanship*<sup>149</sup> dari para negosiator. Kedatangan anggota baru dari pemerintahan Israel pada negosiasi ini menandai adanya mandat resmi untuk mewakili Negara Israel dalam bernegosiasi dengan PLO. Dan tugas pertama dari negosiator baru ini adalah untuk memeriksa dan menilai apakah ada manfaat atau keuntungan apabila negosiasi Oslo terus dilanjutkan.<sup>150</sup>

Setelah ronde kelima diadakan, negosiasi Oslo tidak lagi proyek bebas Beilin. Negosiasi ini secara resmi telah mendapat perhatian dari pemerintah Israel. **Ronde keenam** dari negosiasi adalah ronde pertama yang dihadiri oleh pejabat resmi Israel yang diakui oleh Rabin dan Peres. Pejabat resmi tersebut adalah Uri Savir, Direktur Umum Kementerian Luar Negeri Israel. Savir tiba di Oslo pada tanggal 20 Mei 1993 dan dengan segera menyadari pentingnya keterlibatan dirinya pada negosiasi Oslo. Dia menetapkan dua bentuk dukungan Israel pada negosiasi rahasia Oslo: prosedural dan substantif.

Prosedural adalah bentuk dukungan yang datang dari Yitzak Rabin yang menghendaki negosiasi rahasia secara total di Oslo dan digunakan untuk mendorong terbukanya kembali negosiasi Washington. Sedangkan substantif adalah bentuk dukungan dari Shimon Peres yang ingin melanjutkan kesepakatan dengan PLO, tetapi tidak bersedia memasukkan Yerusalem sebagai bagian dari pemerintahan sementara Palestina, memulai otonomi Palestina atas Gaza (konsep "*Gaza First*"), dan janji Palestina untuk menegosiasikan segalanya di dalam kerangka kerja bilateral daripada mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah, seperti arbitrase internasional atau mediasi pihak ketiga lainnya.<sup>151</sup> Kedua bentuk dukungan ini secara bersama menginginkan agar proses Oslo terus berjalan, namun keduanya memiliki

---

<sup>149</sup> Praktek dalam memanfaatkan situasi yang berbahaya untuk memperoleh keuntungan dalam politik luar negeri. (Diperoleh dari: Anthony Wanis-St.John, *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*, United States: Tufts University, April 2001, h. 172).

<sup>150</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 172.

<sup>151</sup> *Ibid.*, h. 173-174.



kepentingan dan tujuan yang berbeda terhadap keberlangsungan negosiasi Oslo.

Dengan kedatangan Savir yang membawa dua bentuk dukungan dari pemimpin-pemimpinnya, delegasi Palestina langsung menghubungi Tunis dan menyatakan beberapa kepentingan Israel berdasarkan bentuk dukungan tersebut, sambil mengajukan permintaan atas Jericho dalam hubungannya dengan pemindahan kekuasaan atas Gaza. Suasana negosiasi Oslo pada saat itu penuh dengan perdebatan karena mengkombinasikan dua hal yakni membangun hubungan sekaligus membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak. Setelah melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap negosiasi Oslo, Savir merekomendasikan kepada Rabin dan Peres untuk terus melanjutkan negosiasi Oslo. PLO sendiri berharap Savir segera bergerak ke rancangan naskah deklarasi agar naskah tersebut dapat disampaikan pada delegasi di Washington. Namun, Israel merasa bahwa hal itu akan sia-sia karena *Washington Talks* belum dibuka kembali.<sup>152</sup>

Pada tanggal 6 Juni 1993, ketika melakukan pertemuan dengan Peres, Rabin dengan mendadak mengubah pendapatnya tentang negosiasi Oslo dan memerintahkan agar semua kegiatan yang berhubungan dengan negosiasi Oslo ditunda hingga negosiasi Washington dibuka kembali. Beberapa hari kemudian, Rabin mengirimkan surat resmi kepada Peres yang menyatakan keberatannya terhadap negosiasi Oslo dan kecurigaannya terhadap PLO yang menurutnya sedang mencoba untuk menghalangi jalannya negosiasi Washington. Saat itu delegasi Palestina, dengan perintah dari Tunis, menolak untuk bertemu dengan tim perdamaian Amerika dengan maksud untuk menghindari persetujuan terhadap proposal yang diajukan Amerika Serikat pada negosiasi Washington. Maksud Arafat dengan melakukan langkah ini adalah untuk memberikan tanda kepada Rabin bahwa negosiasi Oslo adalah forum yang lebih menjanjikan. Peres secara tertulis membalas surat yang diajukan Rabin sebelumnya, yang menyatakan sikap PLO untuk memulai kembali negosiasi Washington sekaligus untuk menunjukkan kepada Rabin tentang pentingnya pengaruh Tunis sehubungan dengan keberlangsungan

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, h. 174.

negosiasi Washington. Rabin akhirnya mengalah dan bersedia untuk mengadakan pertemuan dengan Peres pada tanggal 10 Juni 1993.<sup>153</sup>

**Ronde ketujuh** dari negosiasi Oslo diselenggarakan pada tanggal 14-15 Juni 1993 bersamaan dengan negosiasi Washington yang akhirnya dilanjutkan kembali. **Ronde kedelapan** berlangsung pada tanggal 25-27 Juni 1993. Baik ronde ketujuh dan kedelapan dari negosiasi Oslo memperkenalkan dinamika baru dalam bernegosiasi sehubungan dengan kedatangan pengacara Israel, Joel Singer, yang bertindak sebagai konsultan hukum Kementerian Luar Negeri Israel. Dua ronde ini ditandai dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada negosiator Palestina. Singer kemudian berpendapat bahwa pada rancangan naskah deklarasi sebelumnya tidak banyak memenuhi kepentingan Israel. Dia merancang ulang naskah deklarasi agar dapat memenuhi kepentingan Israel.<sup>154</sup>

Ketika negosiasi berlangsung, Singer menyatakan bahwa negosiasi Oslo sebaiknya mengatur tentang pengakuan bersama. Singer berharap bahwa PLO dapat menjalankan tanggung jawab untuk mengawasi partai politik yang saling bertentangan di wilayah pendudukan, mencegah kekerasan dari golongan anti Israel, dan menyatakan bahwa PLO hanya akan memegang peran tersebut jika PLO menandatangani naskah kesepakatan dan juga mengakui keberadaan Israel. Pada awalnya, Rabin dan Peres tidak menyetujui ide dari Singer ini, namun Rabin kemudian memberikan persetujuannya dan meminta Singer untuk mengakuinya sebagai inisiatif sendiri. Selama ronde kedelapan negosiasi Oslo, Singer secara resmi menghadirkan rancangan baru naskah deklarasi kepada Palestina. Kehadiran rancangan baru ini menimbulkan pertanyaan di kalangan delegasi Palestina tentang keberadaan rancangan naskah sebelumnya. Abu Ala' atas nama Arafat mengajukan beberapa pertanyaan kepada negosiator Israel terkait hal tersebut. Untuk membujuk PLO, Singer mengangkat isu pengakuan bersama, yang kemudian direspon dengan luar biasa oleh PLO yang memang ini adalah salah satu alasan keikutsertaan mereka di dalam negosiasi Oslo.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 174-175.

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 176-177.

**Ronde kesembilan** diselenggarakan pada tanggal 4-6 Juli 1993 di Greshheim, di sebelah utara Oslo. Singer mengajukan rancangan baru naskah *Declaration of Principles* termasuk penyerahan otonomi secara perlahan-lahan terhadap Gaza dan Jericho. Persetujuan terhadap status sementara akan dinegosiasikan kemudian sekaligus membahas penambahan otonomi Palestina ke daerah-daerah lain disekitar Tepi Barat. Perbedaan-perbedaan penting tetap ada dalam membicarakan Jerussalem dan penduduk Palestina yang berada didalamnya. Walau begitu, kedua belah pihak telah merasa adanya kemajuan di dalam negosiasi ini, serta kepercayaan dan keyakinan diantara kedua belah pihak telah semakin kuat diantara mereka. Abu Mazen melaporkan bahwa PLO telah dianggap sebagai rekan penting, walaupun Israel terus mendesak untuk mempublikasikan hasil final menjadi pencapaian negosiasi Washington. PLO sendiri memiliki sedikit ketertarikan mengenai hal ini dan lebih memilih untuk menunjukkan peran pentingnya sebagai rekan yang dapat diandalkan melalui negosiasi Oslo, daripada negosiasi Washington yang selama ini menolaknya.<sup>156</sup>

**Ronde kesepuluh** diadakan pada tanggal 11 Juli 1993. Abu Ala' datang dengan membawa rancangan baru naskah yang didalamnya terdapat beberapa perubahan baru, diantaranya adalah konsep kewilayahan Palestina yang ingin menguasai seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat. Negosiator Israel menolak perubahan baru tersebut dan memandangnya sebagai "permintaan baru Palestina". Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Norwegia, Holst, mengunjungi Arafat di Tunis. Holst kemudian menyampaikan kepada Arafat resiko yang akan timbul dari permintaan barunya yang telah disampaikan oleh Abu Ala'. Holst memasukkan konsep "jalur aman/*safe passage*"<sup>157</sup> sebagai pengganti wilayah tambahan, dan meyakinkan Arafat untuk menerima konsep ini. Selain melakukan perannya untuk meyakinkan Arafat, Norwegia juga berusaha untuk meyakinkan Peres bahwa sudah saatnya Israel mengakui legitimasi PLO dan mengizinkan kedatangan Arafat ke Gaza untuk mulai membicarakan

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

<sup>157</sup> Wilayah yang berada diantara Israel dan Palestina yang bebas dilalui oleh penduduk Palestina maupun Israel. (Diperoleh dari: Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 457-496).

pengelolaan wilayah tersebut. Holst dan timnya bertemu dengan delegasi PLO dan Israel sebelum ronde berikutnya dan menyatakan akan membantu kedua belah pihak tersebut dalam hal penentuan jaminan, mendorong fleksibilitas dan komitmen pada proses negosiasi, serta membantu menyampaikan kepentingan serta prioritas dari salah satu pihak ke pihak lain dan begitu juga sebaliknya.<sup>158</sup>

**Ronde kesebelas** diadakan di Oslo pada tanggal 24-26 Juli 1993. Delegasi Palestina datang dengan membawa rancangan baru mereka tentang naskah deklarasi, yang didalamnya ada beberapa permintaan baru mengenai penarikan mundur pasukan Israel, membentuk polisi Palestina, dan sebagainya. Para peserta negosiasi juga memperhatikan rancangan yang diajukan Israel dari pasal ke pasal untuk menegaskan kesepakatan yang telah diraih dan untuk mengetahui apakah diskusi lebih jauh perlu dilakukan untuk isu-isu tertentu. Savir dan Singer menyatakan kekhawatiran Israel pada isu-isu keamanan dan pembatasan kekuasaan *Palestinian Council*. Isu-isu spesifik yang masih sulit untuk mencapai kata sepakat diantaranya adalah isu-isu yang berhubungan dengan implementasi Resolusi Dewan Keamanan No 242 dan 338, isu mengenai perlu atau tidaknya status final disebutkan di dalam kesepakatan<sup>159</sup>, penarikan mundur pasukan Israel dari Jericho, perlu atau tidak menyebutkan masalah pengungsi Palestina, dan partisipasi warga Palestina di Jerussalem Timur dalam pemilihan umum Palestina. Para negosiator kemudian menghitung bahwa ada 16 (enam belas) isu yang belum disepakati.<sup>160</sup>

Pada tanggal 26 Juli 1993 terjadi krisis di dalam negosiasi Oslo sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan terhadap isu-isu tertentu. Abu Ala' mengumumkan pengunduran dirinya sebagai negosiator di dalam negosiasi Oslo. Savir dan Hischfeld mengatakan negosiasi Oslo adalah kesempatan yang dilewatkan lagi oleh Israel dan Palestina untuk mencapai

<sup>158</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 178-179.

<sup>159</sup> Palestina menginginkan Jerussalem dimasukkan ke dalam status final tersebut, namun Israel menolaknya. Sehingga pertentangan diantara kedua belah pihak itu pun tidak dapat dihindari dan menyebabkan kesepakatan mengenai daerah-daerah yang termasuk pada status final belum dapat diputuskan.

<sup>160</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 179-180.

perdamaian. Delegasi Palestina pun mulai mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke daerah asalnya. Namun Norwegia terus bekerja keras untuk menghancurkan jalan buntu ini. Atas saran dari Larsen, Uri Savir merasa bahwa telah tiba saatnya untuk melakukan tindakan tegas, yakni dengan mendekati Abu Ala' secara pribadi. Savir meminta Abu Ala' untuk mempertimbangkan kembali kelonggaran Israel terhadap 8 (delapan) dari 16 (enam belas) isu. Ia juga memberitahukan Abu Ala' tentang 7 (tujuh) syarat untuk mendapatkan pengakuan Israel terhadap PLO yang akan diberitakan secara luas dan terbuka, walaupun hal ini masih merupakan inisiatif pribadi dari Singer. Abu Ala' akhirnya menerima proposal yang diajukan oleh Savir ini dan berjanji untuk mendorong Arafat agar melonggarkan juga ketidakcocokannya dengan Israel serta menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Israel untuk pengakuan PLO.<sup>161</sup>

Pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 1993, Rabin, tanpa sepengetahuan negosiatornya di Oslo, mengirimkan surat kepada Arafat melalui Menteri Kesehatan Israel Haim Ramon yang berhubungan dengan PLO melalui Dr. Ahmed al-Tibi, warga Palestina di Israel. Di dalam suratnya, Rabin menyatakan pandangan Israel untuk membatasi kewenangan pemerintahan sementara Palestina baik secara geografi (wilayah kewenangan) dan fungsional (tugas-tugas yang dijalankan), menyatakan intervensi IDF di dalam wilayah otonomi, dan memindahkan permukiman Yahudi dari daerah kekuasaan Palestina. Arafat kemudian membalas surat Rabin yang mengizinkan pengawasan Israel terhadap daerah pendudukan dan menyetujui pengecualian terhadap Jerussalem dari wilayah kekuasaan sementara Palestina, namun dengan satu syarat yakni dibentuknya persetujuan mengenai pengakuan bersama (*mutual recognition agreement*).<sup>162</sup>

Ketika akan mengirimkan surat dari Rabin kepada Arafat, al-Tibi menyampaikannya surat tersebut melalui perantara Abu Mazen. Abu Mazen mengatakan kepada al-Tibi, saat menyerahkan surat balasan Arafat, bahwa dirinya akan mundur dari negosiasi Oslo dan mengancam akan membatalkan partisipasi Palestina di *Washington Talks*. Al-Tibi kemudian menyampaikan

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 180-181.

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 181-182.

perkataan Abu Mazen tersebut kepada Haim Ramon yang tentu saja akan meneruskannya kepada Rabin. Namun Rabin tidak kehilangan akal. Untuk mendorong PLO agar bersedia melanjutkan negosiasi Oslo, Rabin pun menggerakkan kembali negosiasinya dengan Syria.<sup>163</sup> PLO pun kemudian khawatir jika Rabin lebih memilih untuk bernegosiasi dengan Syria akan meminggirkan kesepakatan dengan Palestina yang telah dicapai di Oslo.<sup>164</sup>

Menteri Luar Negeri Norwegia, Holst, menawarkan bantuannya kepada Beilin sebagai mediator untuk menyelenggarakan kembali negosiasi Oslo. Norwegia mulai mencari cara untuk mengadakan kembali negosiasi Oslo. Pada bulan Agustus, Norwegia mengadakan pertemuan tidak resmi antara Abu Ala' dan Hirschfeld. Secara bersama mereka berusaha mengurangi isu-isu yang disengketakan dari sekitar 20 (dua puluh) menjadi 3 (tiga). Mereka kemudian membicarakan kehadiran institusi Palestina di Jerussalem serta tanggung jawab keamanan, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi tersebut di Oslo. Dengan penyelesaian ini, disimpulkan bahwa beberapa isu yang tidak perlu diselesaikan dengan segera, dapat ditunda hingga diadakannya negosiasi kesepakatan untuk memindahtangankan Gaza dan Jericho.<sup>165</sup>

Norwegia mengajukan tanggal baru untuk melanjutkan kembali negosiasi Oslo. **Ronde kedua belas** akan diadakan pada tanggal 13-15 Agustus 1993. Israel tidak akan menerima formulasi baru Palestina tentang 7 (tujuh) syarat yang diajukan Israel untuk pengakuan bersama, sehingga isu ini akan ditunda setelah adanya penyimpulan deklarasi. Pada tanggal 17 Agustus 1993, Shimon Peres melakukan perjalanan resmi ke Swedia dan Norwegia. Delegasi Israel memanfaatkan kunjungan Peres ini dengan mengajukan usulan agar Peres bertemu dengan Holst di Stockholm dan kemudian melakukan negosiasi diantara para pihak untuk menyelesaikan rancangan naskah deklarasi. Pihak Israel diwakili oleh Peres, Singer, dan Avi Gil (kepala

---

<sup>163</sup> Keputusan Rabin untuk menggerakkan kembali negosiasi dengan Syria membuahkan hasil. Pada tanggal 3- 4 Agustus 1993, Israel dan Syria sepakat untuk menyetujui konsep tentang penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan sebagai pertukaran normalisasi hubungan dengan Syria.

<sup>164</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 182-183.

<sup>165</sup> *Ibid.*, h. 184.

karyawan Peres) yang berada di Stockholm. Sedangkan pihak Palestina diwakili oleh Arafat, Abu Mazen, Abu Ala', dan Hassan Asfour<sup>166</sup> yang berada di Tunis. Negosiasi dilakukan dengan 9 (sembilan) kali konferensi telepon yang dilakukan secara bergantian antara pemimpin Israel dan Palestina yang berlangsung disepanjang malam hingga keesokan harinya. Berkat keterlibatan Peres dan Arafat, hanya satu isu yang tetap terbuka dan Peres mendelegasikannya ke Uri Savir yang segera berangkat dari Israel ke Norwegia bersama Hirschfeld dan Pundak. Abu Ala' dan Hassan Asfour juga segera berangkat menuju Norwegia dari Tunis untuk bertemu dengan delegasi Israel.<sup>167</sup>

Di sore hari tanggal 19 Agustus 1993, Savir dan Abu Ala' bertemu untuk menyelesaikan isu yang tertunda di dalam rancangan naskah deklarasi, yakni kapankah 5 (lima) tahun periode sementara akan dimulai dan berakhir. Penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza akan menandai dimulainya periode sementara dan negosiasi mengenai status final akan diselenggarakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun semenjak penarikan mundur pasukan Israel.<sup>168</sup> Yassir Arafat menginginkan seorang ahli hukum memeriksa rancangan naskah *Declaration of Principles*. Pemerintah Mesir mengajukan satu nama, yakni Taher al-Shash, seorang diplomat Mesir dan pengacara yang pernah bekerja untuk Persetujuan *Camp David* dan kini bekerja sebagai delegasi Palestina di Washington. Al-Shash kemudian dipanggil ke Oslo pada pagi hari tanggal 19 Agustus 1993. Perhatian utama Al-Shash pada rancangan naskah deklarasi ini adalah apa yang diperoleh Palestina, bukan bahasa hukum pada dokumen tersebut.<sup>169</sup>

Mendekati malam tanggal 19 Agustus 1993, Holst merencanakan upacara rahasia untuk menandai penandatanganan dokumen kesepakatan Israel dan Palestina. Abu Ala' dan Hassan Asfour menandatangani dokumen tersebut atas nama PLO, sedangkan Savir dan Singer melakukan

<sup>166</sup> Salah satu pejabat penting PLO di Tunis yang bekerja sebagai sekretaris pada salah satu komite PLO yang berfungsi untuk mengawasi perkembangan *Washington Talks*.

<sup>167</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 185.

<sup>168</sup> Lihat lampiran D mengenai *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*.

<sup>169</sup> Anthony Wanis-St.John, *op.cit.*, h. 185-186.

penandatanganan atas nama pemerintah Israel. Deklarasi yang berjudul *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri Secara Sementara), telah disetujui oleh petinggi pembuat kebijakan kedua belah pihak. Suatu terobosan telah dicapai, namun masih ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, yakni kesepakatan tersebut harus secara resmi ditandatangani, diratifikasi, dan kemudian diimplementasikan. Ketiga hal ini berhubungan dengan pertanyaan siapa yang akan menandatangani kesepakatan ini atas nama Palestina. Dan jawaban atas pertanyaan ini ada hubungannya dengan isu pengakuan bersama.<sup>170</sup>

Setelah penandatanganan deklarasi di Oslo dilakukan, Rabin menghubungi Beilin pada tanggal 22 Agustus 1993 dan menanyakan apakah penandatanganan yang dilakukan memuat pasal tentang PLO yang menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk terorisme. Beilin menginformasikan kepadanya bahwa dokumen pengakuan bersamalah yang mengatur ketentuan tersebut, bukan *Declaration of Principles*. Rabin memerintahkan Beilin untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan komitmen tersebut. Beilin kemudian menghubungi Norwegia dan mendiskusikan permintaan Rabin tersebut. Baik Beilin maupun Holst menyadari bahwa PLO tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan bersenjata tanpa ada pertukaran yang menguntungkan dirinya. Pertukaran tersebut adalah mendapatkan pengakuan dari Israel.<sup>171</sup>

Pada waktu itu, Amerika Serikat telah diinformasikan tentang kesepakatan Oslo. Peres mencoba untuk menyakinkan Warren Christopher, Sekretaris Negara Amerika Serikat pada saat itu, untuk menyatakan kesepakatan tersebut sebagai hasil kerja keras Amerika Serikat. Amerika menolak ide Peres tersebut. Walau begitu, Amerika Serikat tetap memberikan dukungannya dan mulai membuat persiapan untuk upacara penandatanganan yang akan dilakukan di Gedung Putih. Pada tanggal 30 Agustus, Uri Savir dan Abu Ala' kembali ke Oslo untuk membicarakan tentang isu pengakuan bersama. Tanpa adanya penyelesaian terhadap isu ini, Israel khawatir bahwa

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 186.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 186-187.



PLO tidak akan mengakui *Declaration of Principles*. Pada tanggal 3 September 1993, Peres dan Holst mengadakan kembali konferensi telepon dengan Tunis. Savir dan Ala' melanjutkan kembali negosiasi mereka di Paris pada tanggal 9-10 September, atas saran dari Holst.<sup>172</sup>

Perwakilan Israel, Palestina, dan Norwegia berkumpul kembali di Paris. Di Tunis, Arafat mengumpulkan Dewan Eksekutif PLO, sementara Rabin dan Peres memantau peristiwa tersebut dari Israel. Para delegasi kemudian membicarakan rencana pengakuan PLO terhadap Israel, komitmen PLO untuk menghentikan intifada, menghentikan penggunaan kekerasan dan menghukum warganya yang melakukan kekerasan tersebut, dan membatalkan pasal-pasal yang terdapat di dalam *Palestinian National Charter* yang bertentangan dengan pengakuan terhadap Israel. Sedangkan Palestina sendiri mengharapkan jaminan dari Israel untuk menghentikan pendirian permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.<sup>173</sup>

Pengakuan bersama terdapat di dalam 2 (dua) buah surat yang saling ditukarkan antara Rabin dan Arafat.<sup>174</sup> Surat yang oleh Arafat untuk Rabin menyatakan pengakuan Palestina terhadap Israel, menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338, meninggalkan penggunaan terorisme dan bentuk kekerasan lainnya, dan mengubah beberapa bagian dari *Palestinian National Charter* yang bertentangan dengan komitmen Palestina untuk mengakui Israel. Sedangkan surat dari Rabin untuk Arafat menyatakan bahwa pemerintah Israel telah memutuskan untuk mengakui PLO sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat Palestina dan memulai negosiasi dengan PLO dalam proses perdamaian di Timur Tengah.<sup>175</sup> Arafat dan Peres secara terpisah juga membuat surat yang ditujukan kepada Holst. Dalam suratnya, Arafat menyatakan komitmen PLO untuk menghentikan intifada, sedangkan Peres menyatakan komitmen Israel untuk menjaga institusi Palestina di Jerussalem.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 187-188.

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 188.

<sup>174</sup> Lihat lampiran D tentang *Israel-PLO Recognition*.

<sup>175</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 25.

<sup>176</sup> Anthony Wanis-St.John, *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*, United States: Tufts University, April 2001, h. 189.

Pagi hari tanggal 13 September 1993, Arafat menyatakan akan berangkat menuju Washington jika kata-kata yang terdapat di dalam pembukaan *Declaration of Principles* diganti dari “Delegasi Palestina” menjadi “PLO”. Awalnya Amerika Serikat dan Israel merasa kebingungan dengan permintaan Arafat di saat-saat terakhir ini. Namun kemudian keduanya mengalah dan negosiasi yang dimulai secara resmi semenjak tanggal 20 Januari 1993 di Norwegia, akhirnya selesai. Abu Mazen dan Shimon Peres melakukan penandatanganan *Declaration of Principles*, sementara Presiden Bill Clinton mengantarkan Yassir Arafat dan Yitzak Rabin untuk melakukan jabat tangan yang bersejarah dalam hubungan kedua belah pihak tersebut.<sup>177</sup>

#### 4.3 Oslo Agreement sebagai Harapan Baru untuk Perdamaian

Meskipun keberadaannya diragukan dan masih memiliki pembatasan-pembatasan di dalam ketentuannya, Oslo Agreement merupakan suatu terobosan yang luar biasa di dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Generasi-generasi mendatang akan melihat kembali momentum yang terjadi pada hari Senin pada tanggal 13 September 1993, dimana Oslo Agreement ditandatangani di Gedung Putih dan ditutup dengan jabat tangan antara Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin, dengan Pemimpin PLO, Yassir Arafat. Peristiwa ini adalah peristiwa terpenting bagi Timur Tengah di sepanjang abad 20. Melalui peristiwa ini, dua pemimpin tersebut telah mengubah peta geopolitik di seluruh wilayah Timur Tengah.<sup>178</sup>

Walaupun penandatanganan dilakukan di Washington, kesepakatan tersebut dinegosiasikan dan disetujui pada bulan Agustus di Oslo, Norwegia sehingga “Oslo Agreement” jauh lebih tepat untuk menamakan kesepakatan ini daripada “Washington Agreement”. Kesepakatan ini memuat di hal utama, yang keduanya dihasilkan melalui negosiasi tertutup di ibukota Norwegia. Hal pertama adalah pengakuan bersama antara Israel dan Palestina dimana pengakuan ini terdiri atas dua surat yang ditandatangani oleh kedua pemimpin bangsa tersebut pada tanggal 9 dan 10 September 1993. Hal kedua adalah *Declaration of Principles*, yang memuat tentang agenda negosiasi untuk membentuk pemerintahan otonomi

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 190.

<sup>178</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 24.

Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hampir seluruh perhatian diberikan pada saat penandatanganan Oslo Agreement, tapi tanpa pengakuan bersama diantara kedua belah pihak maka tidak akan ada kesepakatan untuk membentuk pemerintahan otonomi Palestina.<sup>179</sup>

Di dalam surat yang diberikannya untuk Rabin, Arafat memandang bahwa penandatanganan Oslo Agreement menandai era baru di dalam sejarah Timur Tengah. Ia kemudian menegaskan kembali komitmen PLO untuk mengakui hak Israel untuk hidup di dalam damai dan rasa aman, menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242<sup>180</sup> dan 338<sup>181</sup>, meninggalkan penggunaan terorisme dan bentuk kekerasan lainnya, dan mengubah beberapa bagian dari *Palestinian National Charter* yang bertentangan dengan komitmennya ini. Rabin kemudian membalas surat dari Arafat tersebut secara singkat yang terdiri dari satu kalimat, yakni Rabin menyatakan bahwa pemerintah Israel telah memutuskan untuk mengakui PLO sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat Palestina dan memulai negosiasi dengan PLO dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Ketika penandatanganan berlangsung di Washington pun, Rabin menyatakan bahwa Oslo Agreement adalah kesepakatan pertama antara Israel dan Palestina semenjak pembentukan Negara Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri konflik dan penderitaan, antara Palestina dan Yahudi serta antara Palestina dan Israel.<sup>182</sup>

Oslo Agreement juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi diantara dua pelaku utama di dalam konflik Israel dan Arab. Konflik ini memiliki dua dimensi, yakni dimensi pertama adalah konflik antar negara (Israel dan negara-negara Arab) dan kedua adalah pertentangan antara Israel dan Palestina. Dimensi yang terakhir selalu menjadi inti permasalahan konflik antara Israel dan

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 3-4.

<sup>180</sup> Merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pasca Perang Enam Hari, tepatnya pada tanggal 22 November 1967. Selain berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari daerah-daerah yang berhasil didudukinya, resolusi ini juga menghendaki penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di Timur Tengah serta menghormati hak negara-negara tersebut untuk hidup dalam damai. Berdasarkan resolusi tersebut, maka Negara Israel pun harus dihormati selayaknya negara-negara lain yang ada di Timur Tengah.

<sup>181</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1973 pasca Perang Yom Kippur. Resolusi ini menghendaki diadakannya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242.

<sup>182</sup> Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 25.

negara-negara Arab.<sup>183</sup> Negara-negara Arab terlibat di dalam konflik Palestina dikarenakan rasa solidaritas yang dimiliki negara-negara tersebut terhadap masyarakat Arab Palestina melawan Yahudi. Kini setelah PLO secara resmi mengakui Israel, maka negara-negara Arab tersebut tidak memiliki alasan untuk melanjutkan penolakan mereka terhadap Israel. Pengakuan PLO tersebut terhadap Israel menyebabkan hubungan antara dunia Arab dan Israel menjadi lebih baik. Ketika Rabin berhenti di Rabat dalam perjalanannya kembali ke Israel setelah melakukan penandatanganan di Washington, dia menerima kunjungan dari Kepala Pemerintahan Moroko yakni Raja Hasan II. Beberapa negara Arab seperti Tunisia dan Arab Saudi mulai merencanakan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan Liga Arab juga mulai mendiskusikan pencabutan boikot ekonomi yang telah dilakukan semenjak Israel terbentuk.<sup>184</sup>

Jordania adalah negara yang paling terpengaruh dari kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Sehari setelah Oslo Agreement ditandatangani di Washington, perwakilan dari Negara Jordania dan Israel melakukan penandatanganan terhadap persetujuan yang mengatur agenda negosiasi untuk perdamaian diantara kedua belah pihak. Obyek dari persetujuan perdamaian ini adalah kepemilikan Tepi Barat dimana Jordania telah kehilangan kuasanya atas wilayah ini semenjak diambil alih oleh Israel ketika terjadi perang pada bulan Juni 1967. Tahun 1991, ketika *Madrid Conference* berlangsung, penguasa tertinggi Jordania yakni Raja Hussein, melibatkan negosiator dari Palestina ke dalam negosiasi perdamaian sebagai bagian dari delegasi bersama (*joint delegation*). Ketika agenda antara Jordania dan Israel pada saat itu telah siap untuk ditandatangani, Raja Hussein memutuskan untuk menunda penandatanganan hingga adanya kemajuan pada agenda Israel-Palestina. Namun kini, setelah kesepakatan antara Israel dan Palestina telah dicapai, maka penandatanganan yang sempat tertunda sekarang dapat dilakukan.<sup>185</sup>

Jabat tangan antara Yitzak Rabin dan Yassir Arafat di Washington pada tanggal 13 September 1993 merupakan suatu simbol dari penyelesaian permasalahan diantara dua bangsa. Penyelesaian ini didasarkan atas kompromi

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 36.

mengenai pembagian Palestina (*partition of Palestine*). Pembagian ini bukanlah ide baru, karena sebelumnya sudah diajukan oleh *Peel Commission* pada tahun 1937 dan kemudian oleh PBB pada tahun 1947, namun keduanya ditolak oleh Palestina yang bersikeras memiliki Palestina secara keseluruhan. Tapi kini baik Israel dan Palestina telah menerima rencana pembagian Palestina tersebut. Kedua belah pihak mengesampingkan perselisihan mereka mengenai siapa yang berhak atas Palestina dan beralih untuk menemukan solusi bagi permasalahan mereka. Ide pembagian Palestina pada akhirnya diterima oleh kedua belah pihak yang telah kelelahan setelah sekian lama saling berperang untuk memiliki tanah Palestina secara keseluruhan sebagai bagian dari wilayahnya.

